



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PENGEMBANGAN PENGELOLAHAN INFORMASI PKP DAN OPERASIONAL PPID

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab 2 Referensi Hukum, Bab 3 membahas Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Bab 5 membahas Kesimpulan Dan Saran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2019 ini .

Medan, Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Sasaran.....	1
1.4 Keluaran.....	2
1.5 Ruang Lingku Kegiatan.....	2
1.6 Tenaga Pendukung.....	2
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	2
Bab 2 Referensi Hukum	3
Bab 3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik...	4
3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	8
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya.....	9
3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019.....	9
3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019.....	13
Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	14
Bab 5 Kesimpulan Dan Saran.....	15

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

I.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

I.4 Keluaran

Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat dengan seluas-luasnya.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain :

- Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data.
- mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi.
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

1.6 Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang dimaksud bertugas menginput seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut :

- Pria/wanita maksimal berusia 35 tahun;
- Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem Informasi;
- Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
- Mampu merekam, mengedit dan menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
- Menguasai *manage servis server* berikut software pendukungnya;

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 (sepuluh) bulan.

1.7 Jangka Waktu Pekerjaan

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

Bab 2

Referensi Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

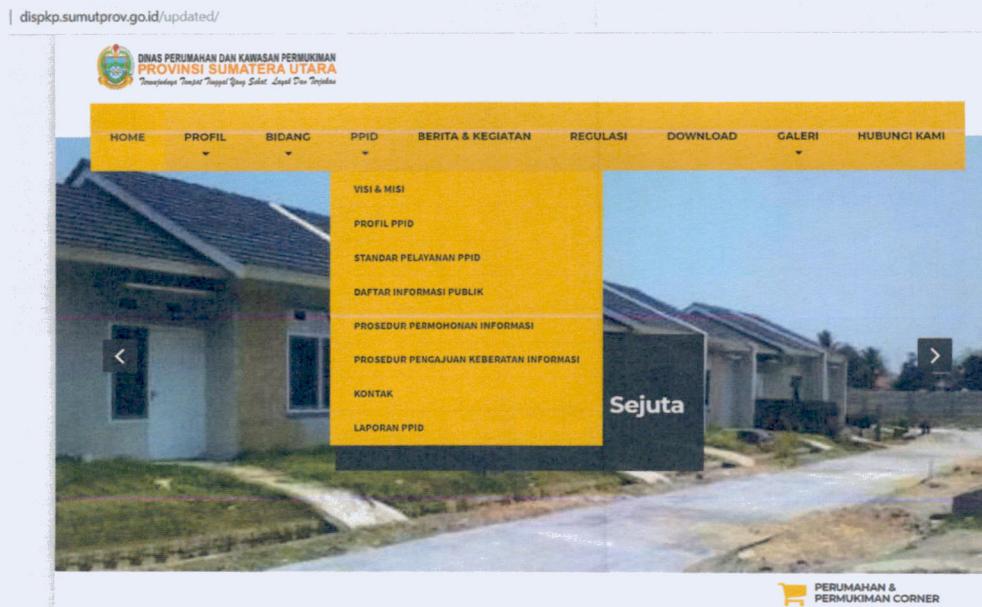
Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistik.

3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media, namun sebagai berikut :

- Melalui website <http://dispkp.sumutprov.go.id>

Website Dan Aplikasi PPID



Daftar Informasi Publik Di Aplikasi PPID

The screenshot shows the 'Daftar Informasi Publik' (List of Public Information) section of the Disnakertrans Sumut website. At the top, there is a navigation bar with links to HOME, PROFIL, BIDANG, PPID, BERITA & KEGIATAN, REGULASI, DOWNLOAD, GALERI, and HUBUNGI KAMI. Below the navigation bar, there is a sidebar with links to VISION & MISSION, PROFILE PPID, STANDAR PELAYANAN PPID, DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI, PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI, KONTAK, and LAPORAN PPID. The main content area displays a table titled 'Show 10 entries' under 'Jenis Informasi'. The table lists five items: 1. Daftar Nama Penjabat, 2. Peraturan Gubernur, 3. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN KESRA, 4. Rencana Kerja TA 2018, and 5. RENCANA STRATEGIS. Below the table, it says 'Showing 1 to 5 of 5 entries'. To the right of the table, there is a 'Kegiatan' (Activities) section with a list of activities: Berita & Kegiatan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Rumah Swadaya, and Bidang Rumah Umum.

Prosedur Permohonan Informasi

The diagram illustrates the 'FLOW PERMINTA' (Information Request Flow) process. It starts with a 'Pemohon' (Requester) on the left, who sends a request (1) to a 'Petugas Meja Informasi' (Information Counter Officer). The officer (2) prepares the request and forwards it to a 'PPID' (Information Management Department) officer. The PPID officer (3) processes the request and informs the Petugas Meja Informasi. The Petugas Meja Informasi then (4) informs the Pemohon. Finally, the Pejabat Informasi (Information Officer) (5) provides a response (tanggapan/jawaban) to the Pemohon. The 'Kegiatan' (Activities) listed on the right side of the diagram include Berita & Kegiatan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Rumah Swadaya, and Bidang Rumah Umum.

Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

disppk.sumutprov.go.id/updated/prosedur-pengajuan-keberatan-informasi/

The screenshot shows the website's header with the logo of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. The main navigation menu includes HOME, PROFIL, BIDANG, PPID, BERITA & KEGIATAN, REGULASI, DOWNLOAD, GALERI, and HUBUNGI KAMI. A sidebar on the left lists links such as VISI & MISI, PROFIL PPID, STANDAR PELAYANAN PPID, DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI, PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI, KONTAK, and LAPORAN PPID. The main content area is titled 'PROSEDUR PENGAJUAN' and 'TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI'. It contains a detailed list of steps for filing a complaint, including the submission of a written complaint, the processing by the agency, and the final resolution. There is also a section for 'FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN INFOMASI'.

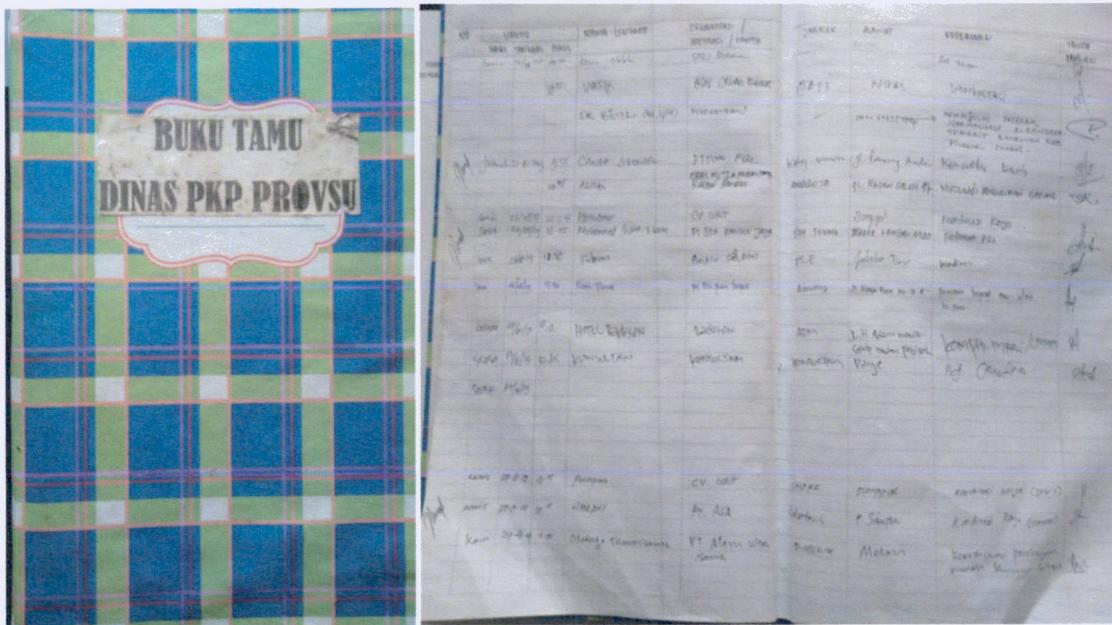
Laporan PPID

disppk.sumutprov.go.id/updated/laporan-ppid/

The screenshot shows the website's header with the logo of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. The main navigation menu includes HOME, PROFIL, BIDANG, PPID, BERITA & KEGIATAN, REGULASI, DOWNLOAD, GALERI, and HUBUNGI KAMI. A sidebar on the left lists links such as VISI & MISI, PROFIL PPID, STANDAR PELAYANAN PPID, DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI, PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI, KONTAK, and LAPORAN PPID. The main content area displays a table of reports, with the first two entries being 'Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2017' and 'Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2018'. At the bottom, there is contact information for the department, including an email address (dinpt_pkp@sumutprov.go.id) and a phone number (061-4111111). There is also a note about office hours (Senin - Jumat 08.00 - 16.00).

- Ruang Pelayanan Informasi

Mengisi Buku Tamu



Mengisi Form Permintaan Informasi

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Nama		Nama	
NIK / NIP		NIP / NPWNP	
Alamat		Alamat	
Pekerjaan		Pekerjaan	
Umur		Umur	
Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
Nomor Telepon		Nomor Telepon	
Asal Instansi		Asal Instansi	
Tujuan Penggunaan Informasi		Tujuan Penggunaan Informasi	
Informasi Yang Diminta		Informasi Yang Diminta	
Penyampaian Informasi Oleh		Penyampaian Informasi Oleh	
Tanggapan Penberi Informasi		Tanggapan Penberi Informasi	
Medan, _____		Medan, 12 Februari 2019	
		<i>[Signature]</i>	

Tempat Terima Tamu



3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/2259/PKP-Provsu/2019 yaitu :

1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID
2. Kasubbag Umum selaku PPID Pembantu
3. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris PPID Pembantu.
4. Syafri Chaniago, ST (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi.
5. Fitria Dewi, ST (Staf Bidang PSU) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi.
6. Agus Tiawan Setiadi (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi :
 - Hotdo, S.Sos
 - Armada Sahputra, ST
 - Nahran
 - Anthoni Veery Mardianta, ST, MT
 - Azwin Anwarsyah Pasaribu, ST

3.3 Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan nama kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dengan pagu anggaran sebesar Rp160.269.950,00 (Seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 125.400.000,00 selama Satu Tahun;
- Belanja Cetak sebesar Rp. 2.369.950,00
- Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka rapat sebesar Rp. 2.500.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Ahli IT) sebesar Rp. 30.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.

3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Tujuan Penggunaan Informasi	Informasi Yang Diminta	Keputusan	Tanggal Jawaban
1.	26 Feb 2019	Aulia Rahman Purba	Engiine sales	Kebutuhan Genset Dinas PKP	Penganggaran pembelian genset	Genset dibutuhkan apabila telah dilakukan pemb. Gedung kantor Dinas PKP yang baru	-
2.	20 Maret 2019	Yaulina Mendrofa, ST	Dinas Perkim Kab.Nias Selatan	Usulan Kebutuhan Rumah Khusus	Mekanisme pengajuan proposal rumah khusus	-	-
3.	27 Maret 2019	Faduhusa Laia	DPRD Kab.Nias Selatan	Untuk memastikan proposal bedah rumah di Kab.Nias Selatan	Mekanisme pengajuan proposal bedah rumah	Kegiatan RTLH bersumber dari Dana APBN dan APBD, untuk proposal melalui dana DAK perumahan bisa langsung disampaikan melalui aplikasi Krisna	-

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

4.	1 April 2019	M.Irfan Taguh	Dinas Perkim dan Perhubungan Kab.Palas	Koordinasi permohonan pemb. Rumah susun pondok pesantren Babul Hasanah	Mekanisme permohonan pemb. Rumah susun pondok pesantren Babul Hasanah	Pemb.rumah susun akan difasilitasi untuk dimohonkan ke Kementerian PUPR	-
5.	23 April 2019	Melati Sipayung	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
6.	23 April 2019	Ade Mirna Pris Rezeki, ST	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
7.	23 April 2019	Suharni Lubis, SH	Dinas Perkim Dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
8.	23 April 2019	M.Hafri Fadli	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
9.	23 April 2019	Achmad Ridwan, ST	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
10.	23 April 2019	Hendro Susanto	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
11.	23 April 2019	Fariz Hamzah	Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

12.	7 Mei 2019	Jhonson	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Penyampaian Produk Pabrikan Septictank Individualy	-	-	-
13.	7 Mei 2019	Indra Kusuma	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Penyampaian Produk Pabrikan Septictank Individualy	-	-	-
14.	17 Mei 2019	Kesadaran Zagoro, SE	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Nias Selatan	Usulan DAK Afirmasi, DAK Reguler, BSPS	Tata cara pengusulan DAK Afirmasi, DAK Reguler, BSPS	-	-
15.	29 Mei 2019	Ahmad Ibnu Khaldu, ST	Bappeda Tapteng	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
16.	29 Mei 2019	Hadi Saputra	Bappeda Tapteng	Penyampaian usulan Dana APBD utk e-musrenbang	-	-	-
17.	27 Agustus 2019	Yoseph	Balitbang PUPR	Dalam rangka kegiatan penelitian wilayah pengembangan strategis	Data Primer kegiatan pada Dinas PKP Provsu	-	-
18.	9 September 2019	Zahara	Sales Goverment PT. Mitsubishi	Penawaran perawatan pengadaan kenderaan	-	-	-
19.	16 September 2019	Randoswati Pohan	Komisi Informasi Provsu	Visitasi untuk peningkatan keterbukaan informasi	Ketersediaan ruang PPID dan pendukung lainnya	-	-

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

20.	16 September 2019	Bestani	Kecamatan Hampanan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hampanan Perak	-	-	-
21.	16 September 2019	Faisal	Kecamatan Hampanan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hampanan Perak	-	-	-
22.	16 September 2019	Chairil Edwin	Kecamatan Hampanan Perak	Mengantarkan berkas Sei Bederah Kec. Hampanan Perak	-	-	-
23.	17 September 2019	Muhammad Yusuf	SMA Negeri 1 Lab.Deli	Untuk data sekolah	Penjelasan tentang RKB SMA Negeri 1 Lab.Deli	-	-
24.	17 September 2019	Agustina Ketaren	Karyawan Swasta	Untuk mengetahui Informasi bangunan dipinggir sungai	Peraturan Sempadan sungai untuk bangunan di Kota Medan	-	-
25.	7 Oktober 2019	Dian kusumawardhani	BPIW Kementerian PUPR	Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai masukkan dalam penyusunan program pengembangan kawasan	Data program pembangunan infrastruktur bidang PUPR Tahun Anggaran 2015-2019 dengan sumber dana APBD	-	-
26.	15 Oktober 2019	Bintang M Purba	Konsultan	Permohonan Data	Untuk kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi dim kws Strategis Provsu	-	-

3.4 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website Dinas. Adapun untuk Tahun 2019, jumlah berita yang telah di tampilkan sebanyak 40 berita. Adapun berita tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang sifatnya di luar Kantor Dinas.

Bab 4

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Secara keseluruhan kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID masih dirasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil visitasi Komisioner Informasi ke Kantor Dinas PKP Provsu pada tanggal 16 September 2019, diperoleh beberapa tangapan dan masukkan terkait dengan pelaksanaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas PKP Provsu antara lain :

- Agar setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang untuk dilaporkan ke Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik;
- Agar dibuat surat edaran untuk mengingatkan kepada anggota PPID agar melaksanakan tupoksi PPID sesuai dengan SOP;
- Agar memperbaiki sarana prasarana pendukung;
- Dalam hal pemberian data, perlu dibuat list data yang bertujuan untuk memilah data apa saja yang bisa dan atau yang tidak bisa diberikan;
- Terkait dengan daftar informasi yang dikecualikan, PPID Pembantu Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan PPID Provinsi dalam rangka pembuatan Surat keputusan Kepala Daerah tentang daftar informasi publik yang dikecualikan;
- Setiap ada permintaan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Legalisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dari Kemenkumham,
 - Kartu Tanda Pengenal,
 - Alamat kantor harus sesuai dengan Akta Notaris.
- Masih kurangnya tenaga pendukung (Tenaga Ahli IT dan Ahli Komunikasi) untuk lebih meningkatkan kualitas website dan konten berita;



Visitasi Komisioner Informasi
Ke Kantor Dinas PKP Provsu

**Laporan Pengembangan Pengelolaan
Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID**

Lampiran

Bab 5

Kesimpulan Dan Saran

Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID antara lain :

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu;
- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan saran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perlunya pengembangan website;
- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung;
- Perlu adanya penambahan personil (Tenaga Ahli IT dan Ahli Komunikasi);

PPID Pembantu



Dra. Beslida Sahmawati, M.Si
Nip. 19671028 199203 2 004

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

*Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Tahun 2019*

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Yenny P
NIK / NIP	:	Ub.31.612129062.100
Alamat	:	Balitbang PUPR
Pekerjaan	:	
Umur	:	54
Jenis Kelamin	:	laki
Nomor Telepon	:	031 8600494
Asal Instansi	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Duta Bhineka Pemerintahan Sekolah
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,


..... Tegar P.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: KESADARAN ZAGORO, S.E
NIK / NIP	: NIP. 19790717 201410 1 003
Alamat	: Desa Bawomataluo, Kec. Panayama
Pekerjaan	: DNS
Umur	: 40 thn.
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Nomor Telepon	: 081396274447
Asal Instansi	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kal. Nias Selatan
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Informasi Yang Diminta	: Mengenai Usulan DAK Afirmasi, DAK REGULER, BSpS
Pelayanan Infomasi Oleh	: Salmanianto, ST
Tanggapan Pemberi Infomasi	: <p>Pengusulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk pembayaran DAK dan APBN (Program BSpS) diusulkan melalui aplikasi terkait. Usulan DAK melalui aplikasi Krisna Selaras yang akan dilakukan paraf berjenjang dari Provinsi, kementrian Dpppnas dan Kementerian Teknis. Daerah harus mengusulkan dengan lengkap; BNPB menerima manfaat dan sesuai utk penanganan Kawasan Kunci.</p>

Medan,17 mei 2019


.....

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	INDRA. KUSUMA
NIK / NIP	:	
Alamat	:	JAKARTA
Pekerjaan	:	MURKENY
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Nomor Telepon	:	0813 6897 0877
Asal Instansi	:	PT. CAHAYA MAS CEMERLANG
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

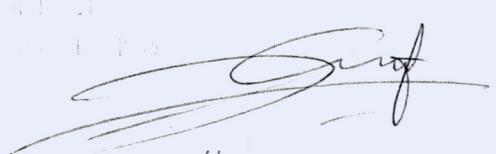
Medan,

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Jhansens
NIK / NIP	:	
Alamat	:	Jakarta
Pekerjaan	:	Market
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Nomor Telepon	:	082121 368836
Asal Instansi	:	Pabrikasi Septictank individual /
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Konsultasi
Informasi Yang Diminta	:	Konsultasi / presentasi produk
Pelayanan Infomasi Oleh :		
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,


.....Jhansens.....

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: FARIZ HATAZAH
NIK / NIP	: 19830213 200509 1003
Alamat	: Jl. TINTA DECI 86. MELUR . NO.15 TB. MOKAWE
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 36 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Nomor Telepon	: 08116306760
Asal Instansi	: BAPPEDA TEBING TINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi	: USULAN APBD PROY 2020 TEBING TINGGI
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 23 APRIL 2019



(.....FARIZ HATAZAH.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Hendro Surayto
NIK / NIP	:	197904 200502 1 001
Alamat	:	Jl. Astrama Kodim 0204/Ds/LK 02 Kel. Damai Sari Kec. P. Hilir.
Pekerjaan	:	PNS
Umur	:	40
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Nomor Telepon	:	0857 7368 9424
Asal Instansi	:	Bappeda kota T-Tiunggi
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Penyampaian usulan APBD prop kota T-Tiunggi
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Infomasi Oleh	:	Kasubbag
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	Baik

Medan, 23 April 2010



(.....Hendro Surayto.....)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama	:	ACHIRAD RIDWAH, ST
NIK / NIP	:	19710501 199903 1002
Alamat	:	JL. TAMAN BAHAGIA 28 A KOTA TEBINGTINGGI
Pekerjaan	:	PNS
Umur	:	48 TAHUN
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Nomor Telepon	:	882274453033
Asal Instansi	:	BAPPEDA KOTA TEBINGTINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi	:	PENYAMPAIAN USULAN APBD PROV 2020
Informasi Yang Diminta	:	-
Pelayanan Infomasi Oleh	:	KASUBAG PROGRAM
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	BAIK

Medan, 23 - 04 - 2019


(Achirad Ridwan)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: M. HAFIZI FADLY
NIK / NIP	: 19800602 200804 1 001
Alamat	: Jl. H. SEI BERUNGKUH NO. 8
Pekerjaan	: PHS
Umur	: 30 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Nomor Telepon	: 0853 622 00022
Asal Instansi	: BAPPEDA KOTA TEBINGTINGGI
Tujuan Penggunaan Informasi	: PENYATAAN USULAN
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pernberi Infomasi	:

Medan,


(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: SUHARSI LUBIS, SH
NIK / NIP	: 10620902 199303 2 002
Alamat	: Jln. Sungai Agung
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 56
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Telepon	:
Asal Instansi	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Informasi Yang Diminta	: Penyampaian usulan APBD Provinsi
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 23.04.2019

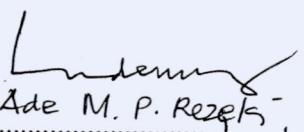


(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: ADE MIRNA PRIS REZEKI, ST
NIK / NIP	: 19750917 200312 2 003
Alamat	: Jl. Nenas No.7 T. Tinggi
Pekerjaan	: PNS - ASN
Umur	: 44 Tahun
Jenis Kelamin	: Pr.
Nomor Telepon	: 081262151463
Asal Instansi	: Dinas Perumahan Permukiman & Kebersihan
Tujuan Penggunaan Informasi	: Penyampaian usulan E - Musrenbang
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 23 APRIL 2019


Ade M. P. Rezeki

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

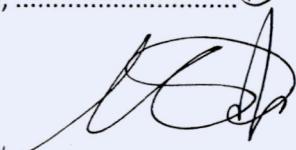
Nama : MELATI SIPAYUNG
NIK / NIP : 19870512 201001 2 023
Alamat : TEBIAS THGCI
Pekerjaan : PAIS
Umur : 31 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nomor Telepon : 085260514445
Asal Instansi : DILAS PERUM & KEBERTHAKI KOTA T-DKZG1
Tujuan Penggunaan Informasi : PENTAMPANAH URULAH DAHA APBD PROY
Informasi Yang Diminta :

Pelayanan Infomasi Oleh :

Tanggapan Pemberi Infomasi :

Medan, 23 APRIL 2017

.....
.....
.....



(..... MELATI SIPAYUNG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: M. IRFAN TAGUH
NIK / NIP	: 19830725 201001 1001
Alamat	: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS
Pekerjaan	: ASN
Umur	: 38 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Nomor Telepon	: 081269282726
Asal Instansi	: DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS
Tujuan Penggunaan Informasi	: MENGANTAR PROPOSAL RUMAH SUSUN
Informasi Yang Diminta	: KOORDINASI PERMOHONAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN BABUL HASANAH
Pelayanan Infomasi Oleh	: Salmananto
Tanggapan Pemberi Infomasi	: pembangunan rumah susun untuk pondok pesantren akan di fasilitasi utk dimohonkan ke kementerian PU PR.

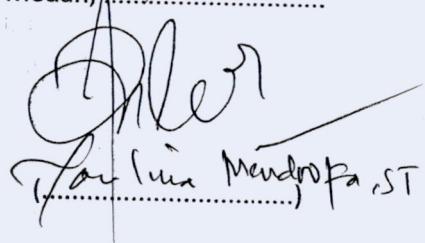
Medan, 1 APRIL 2019

(M. IRFAN TAGUH)
19830725 201001 1001

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: Yantiua Mendrofa, ST
NIK / NIP	: 19820129 200502 1 001
Alamat	: Teluk Dalam
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 37
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nomor Telepon	: 082162705666
Asal Instansi	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan
Tujuan Penggunaan Informasi	: Koordinasi tentang usulan Ruwayah Iklusiv
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 20/3 - 2019


Yantiua Mendrofa, ST

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: Haryati
NIK / NIP	: 19650105 1993 03 1003
Alamat	: Jl. TURI NO 1. (C15) Raya
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 53 th
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Nomor Telepon	: 081263663265
Asal Instansi	: Dinas PKP Kab. Asahan
Tujuan Penggunaan Informasi	: Untuk Perbaikan Pembangunan di Asahan
Informasi Yang Diminta	: Itu yg usual kegiatan TA. 2020 -
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan,

Hari ini
diisi oleh
Haryati

Haryati

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

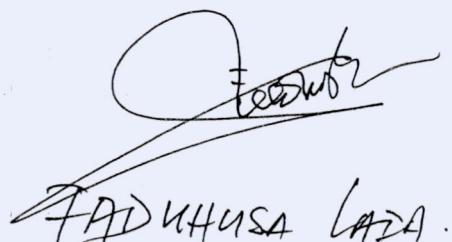
Nama	: AUNIA RAHMAYA PURBA
NIK / NIP	:
Alamat	: PT. TRAKINDO UTAMA , TG. MORAW KM. 9,2 MEK
Pekerjaan	: ENGINE SALES
Umur	: 30 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Nomor Telepon	: 08116157814
Asal Instansi	: PT. TRAKINDO UTAMA
Tujuan Penggunaan Informasi	: PEMBECIAN GENSET
Informasi Yang Diminta	: PEMBECIAN GENSET
Pelayanan Infomasi Oleh	: Salmanianto
Tanggapan Pemberi Infomasi	: Sifat diinformasikan kebutuhan Genset dlm Rangka mendekong Gedung Baru. Dinas PUPR

Medan, 26-FEB-10

AUNIA RAHMAYA PURBA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	FADUHUSA LAIA.
NIK / NIP	:	1214031010690005.
Alamat	:	Helezahulu kec. Lahusa kab. Nisel
Nomor Telepon	:	081376300991.
Asal Instansi	:	DPRD Nias Selatan.
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	<ul style="list-style-type: none">- keposthan Perposel bedah rumah di kabupaten Nias Selatan.- Mekanisme pengajuan Perposel untuk Program yang tersedia.
Pelayanan Infomasi Oleh	:	Salmonianto
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sumber dana APBN program BPSPS tahun 2019 masih menunggu ac menteri PU PR. Nias Selatan sebagai salah satu daerah yg ditunjukkan untuk Rehab RTLH Sumber dana APBD provinsi TA-2019 tidak ada te Nias Selatan- Proposal penyajian Rehab RTLH Utk Pembiryan DAK perumahan disampaikan melalui aplikasi KRISNA Bappenas- Agar pemkab. Nisel merencanakan dan menerapkan SPM Bidang perumahan Rakyat sejua' permin PU PR 29/2018.


FADUHUSA LAIA.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Zahara.
NIK / NIP	:	
Alamat	:	Jl. Gajah Subroto Sp berat.
Pekerjaan	:	Sales government. (plat merah).
Umur	:	23 tahun.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Nomor Telepon	:	
Asal Instansi	:	Mitsubishi sardana.
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Informasi Yang Diminta	:	Penawaran Pengadaan Kendaraan.
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan, 21/01/2017.

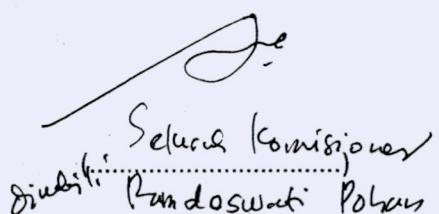
Dllf.

Dittr.
Zahara.
(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
NIK / NIP	:	Komisioner Lengkap
Alamat	:	Jl. Bilal 108 Medan 20239
Pekerjaan	:	Komisioner
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Nomor Telepon	:	
Asal Instansi	:	KI - Sumut
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Visitas & Pemerintahan Keterbukaan Informasi
Informasi Yang Diminta	:	Ruang PPID dan lainnya.
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan, 16 September 2015


Seluruh Komisioner
diukur Rendy Soswati Polans

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: MUHAMMAD YUSUF
NIK / NIP	: 19670329 2007 0110 28
Alamat	: JLN. VETERAN IR. SUKARNO NO 30
Pekerjaan	: CAS DELI
Umur	: 52 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Nomor Telepon	: 085372224940
Asal Instansi	: SMA N 2. CAS DELI
Tujuan Penggunaan Informasi	: UNIK SEKOCAN
Informasi Yang Diminta	: PENJELASAN TENTANG AKB SMA N 2. L. DELI
Pelayanan Infomasi Oleh	: BDIK.
Tanggapan Pemberi Infomasi	: Alokasi pembangunan prang kelet Ban tidak tersedia di Dinas PUPR provsu. Informasi dari cabang dinas Pendidikan tsb harus dicetak lagi ke Binaan Pendidikan provinsi Sumut Bidang SMA atau Sub Binaan program.

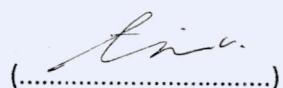
Medan, 17 SEPTEMBER 2019


Muhammad Yusuf

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: AGUSTINA ICETAREN
NIK / NIP	:
Alamat	: JL. JAMIN SINTANG 81
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Umur	: 43 THN
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Nomor Telepon	: 0821 34613372
Asal Instansi	:
Tujuan Penggunaan Informasi	: INFORMASI BANGUNAN DIPERLUKU NGAI
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

17 SEPTEMBER 2019
Medan,


(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: Dian kusumawardhani
NIK / NIP	: 19760202 24122003
Alamat	: Jln pattiura No. 20 Ged. 6 BPW
Pekerjaan	: Lantai 3 Bid. pemantauan dan evaluasi
Umur	: 43 th
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Telepon	: 08567193679
Asal Instansi	: BPW PUPR
Tujuan Penggunaan Informasi	: U/ Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai masukan dalam penyusunan program pengembangan keuangan.
Informasi Yang Diminta	<ul style="list-style-type: none">- Data program pemb. infrastruktur bidang PUPR ta. 2015 - 2019 beserta dana APBD.
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 7. Oktober 2019



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: Binuang, M. Riwita
NIK / NIP	: 1271191711270003
Alamat	: Jl. Tinta
Pekerjaan	: Konultan
Umur	: 43
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nomor Telepon	: 0852 8216 3821
Asal Instansi	: PT. Agro Anha Abadi
Tujuan Penggunaan Informasi	: Permoohonan data
Informasi Yang Diminta	: Data terkait kegiatan Penyajian Analisa Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan,

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: BESTANI,
NIK / NIP	: 19651231 2009061016.
Alamat	: Hampanan Perak.
Pekerjaan	: PNS.
Umur	: 52 Thn.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Nomor Telepon	: 0813 9653 3013.
Asal Instansi	: Kantor Camat Hampanan Perak.
Tujuan Penggunaan Informasi	: Mengantarkan Berkas Rsi Bederak H. Perak.
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

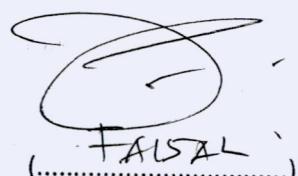
Medan, 16 - Sep 2019


(.....Bestani.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: FALSAL
NIK / NIP	: 19811124 2010 01 1063.
Alamat	: H. PERAK
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 36 Thn
Jenis Kelamin	: PRIBA
Nomor Telepon	: 081362000684.
Asal Instansi	: Kantor Camat H. perak.
Tujuan Penggunaan Informasi	: Menghantarkan Berkas
Informasi Yang Diminta	: SEI BEDERATI
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan, 16 SEP 2015



(.....
FALSAL
.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: CHAIRIL EPWIN
NIK / NIP	: 196307131993031011
Alamat	: JL. TEMPIRAI LECTARI 20 NO.48
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 56
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Nomor Telepon	: 082277700311
Asal Instansi	: JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1 H.P
Tujuan Penggunaan Informasi	: MENGAANTAR BERKAS.
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan,

X

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	HAPI SAPUTRA
NIK / NIP	:	1219031006890004
Alamat	:	PAMDAM
Pekerjaan	:	
Umur	:	30
Jenis Kelamin	:	WIA
Nomor Telepon	:	085274956111
Asal Instansi	:	BAPPERA T.T
Tujuan Penggunaan Informasi	:	E - SUMUT
Informasi Yang Diminta	:	
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,


(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	: AHMAD IBNU KHALDU ST
NIK / NIP	: 19850810201903 1 002
Alamat	: PANDAN
Pekerjaan	: PNS
Umur	: 34
Jenis Kelamin	: PRIA
Nomor Telepon	: 085262266694
Asal Instansi	: BAPPEDA TAPEN 6
Tujuan Penggunaan Informasi	: E-SUMUT
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Infomasi Oleh	:
Tanggapan Pemberi Infomasi	:

Medan,

PPID DPKP Medan
081211111111

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama	:	Yenny P
NIK / NIP	:	Ub.31.612119.063.100
Alamat	:	Balitby Putu
Pekerjaan	:	
Umur	:	54
Jenis Kelamin	:	Laki
Nomor Telepon	:	031 8060014
Asal Instansi	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Peta Siliru Sekolah
Informasi Yang Diminta	:	Pemerintahan
Pelayanan Infomasi Oleh	:	
Tanggapan Pemberi Infomasi	:	

Medan,

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

*Berita Yang Telah Tayang Di Websiten Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Tahun 2019*



JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A: POLYMERS

SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI ABSENSI ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Dalam rangka peningkatan disiplin Aparatur Sipil Kegara (ASN) dan sebagaitindik Isiut, Penurunan Gubernur Sumatera Utara No.18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan sosialisasi tentang Penggunaan Aplikasi Absensi online pada hari ini tanggal 09 Januari 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas. Acara dibuka oleh Bapak Hadi Binger, selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Bapak Hadi Binger menghimbau agar para narasumber memberikan penjelasan yang jelas dan detailnya terkait

dengan proses aksesi tersebut, sehingga para ASN mudah untuk menjalankan tugasnya.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV serta seluruh staf kasi di lingkungan dinas perumahan dan Kawasan perumahan provinsi sumatera utara. Sebagi narasumber pada acara sosialisasi tersebut adalah dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketahui oleh Afwan Juahari selaku kepala seksi pengembangan aplikasi

Pada saat ini ada banyak aplikasi e-baensi online yang dapat digunakan di android disebut dengan mendownload aplikasi e-baensi melalui playstore, kemudian menginstall aplikasi agar dapat digunakan. Aplikasi e-baensi (eSB) disajikan dalam bentuk terintegrasi jika melihatnya e-baensi online diatas publik 07/08 web.

Pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan para operator Bapil Regency cukup banyak memberikan pertanyaan seputar tata cara penggunaan aplikasi. Diharapkan dengan penggunaan Aplikasi e-bensi online ini meningkatkan perilaku kerja dan produktifitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terhadap APL yang belum bertemu masuk akar, pulang lebih awal atau tidak ikut APL pagi akan dibebaskan pemotongan Tunjangan Transportasi (Penghasilan ITTP).



Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI GULUNG MATERIAK UTARA BERUPA RUMAH YANG DIBANGUN PERUTU DAN PERU MELAKUKAN DITINJAUKAN PROVINSI
 - Kepada RPBD Mengapa lahan Rawa Dan Daerah Pergum Pesisir Pantai yang ada di Bidaung Persemaian dan Kawasan Perkebunan
 - KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN UNTUK INI MARDIAN HABIBI HARIBINTU EL-ZH
 - KOGC GROUP DISBURSUKEN (IND) DAN UTAMA, PERCEPATAN PENYATUAN DOKUMEN RPBD RUGI UNDANG, TERINTEGRASI DAN PEKERJA KERJA DI MANAJEMEN
 - SIKERISITUS BALKI UNTUK DILAKUKAN



February 4, 2019 Berkman & Kegelstein

Rapat Awal Penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi

Heden – Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat awal dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 di Aula Kantor Dinas PKP Provinsi. Acara di buka oleh Ida Hanans selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara. Peserta yang hadir merupakan tim yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Tahun Anggaran 2020.



Dalam pengaruhannya, Ida Mariana menyampaikan setiap Pokja selanjutnya dapat menyelesaikan Renja sesuai dengan tujuan pada bidang masing-masing. Selain itu para kepala bidang dapat menyelesaikan tencana program yang bukan hanya pada kegiatan fisik saja, namun untuk kegiatan database. Untuk mendukung penetapan PERMEN PUPR NO.29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat agar para bidang mewujudkannya ke dalam bentuk kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya setiap usulan yang terkait dengan
legistasi Kawasan permukiman untuk di-
sinkronkan dengan SK KWS kumuh. Dalam
segera akan ditindak lanjuti dan untuk

angka kigiatan RTLH telah dibentuk tim sosialisasi RTLH yang selanjutnya agar agaras ditindak lanjuti dan untuk pelencanaan selanjutnya pada daerah KSP harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota, ujarnya.

A photograph showing a group of approximately ten people in a formal meeting room. Some individuals are seated around a long table covered with white paper, while others are standing or seated in the background. The room has a large window and a red curtain on the right side.



Pada Rapat tersebut juga dilaksanakan diskusi/debat tiga-tiga. Pada akhirnya untuk melaksanakan perombakan usulan kegiatan [Dadi]

February 27, 2019 Berita & Kegiatan

REI Bisa Menjadi Organisasi Yang Terdepan Dalam Pengadaan Perumahan MBR Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Medan - REI Sumatera Utara melaksukan secara silaturahmi dengan stakeholders dan dunia Perbenkan sekaligus persiapan HUT REI Sumut yang ke 47 di Medan selesa 28 Februari 2019 kemarin.



Kegiatan ini dihadiri oleh DPP REI, DPD REI dan seluruh anggota REI Provinsi Sumatera Utara. Gubus dalam sambutannya yang dibacakan oleh Hadza Manurung menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja saman dan dukungan yang telah ditunjukkan DPD REI selama ini terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada acara tersebut dilakukan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada Hadza Manurung mewakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Ketua REI Sumut, Ir. Andi Atmaka Panggabean menyampaikan persiapan ulang tahun ini dilakukan oleh seluruh organisasi REI yang ada di masing-masing Provinsi, sedangkan untuk puncak acaranya akan di selenggarakan di Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya organisasi REI ini semakin tumbuh pesat sehingga dapat semakin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat di masa yang akan datang. [Dedi]



Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rencana RP3KP Menjadi Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN DOKUMEN KBPU RUSUWANA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA IJK SEI MANIKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MENGABUNGKAN SUMUT BERHARTABAT

March 5, 2019 Berita & Kegiatan

Tema Rakortek "Menyongsong Pembangunan 2020-2024 Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Yang Selaras Dan Terintegrasi"



PADANG, Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakorteknologi) Tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di Grand Inna Muara, Padang mulai tanggal 25 Februari s/d 1 Maret 2019. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Pabowo. Dalam sambutannya Hadi menekankan lima hal yang menjadi catatan penting bagi para peserta Rakorteknologi yang mengacu pada usulan RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Prioritas

Nasional Tahun 2020 dengan menitikberatkan pada program kerja, yaitu: 1. Pengembangan infrastruktur, 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi, 4. Peningkatan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air, dan 5. Stabilitas keuangan nasional. Adapun tema yang diungkap adalah "Menyongsong Pembangunan 2020-2024 Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Yang Selaras Dan Terintegrasi".

Pelaksanaan Rakorteknologi tahun ini terdapat 34 desk yang berkaitan dengan unsur pemerintahan daerah serta desa Pemerintahan Daerah Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi desa dalam penyelenggaran pemerintahan di desa. Pada saat Kegiatan desk sektor pemukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatra Utara dihadiri oleh Ida Mariana istri Kepala Dinas. Kesempatan tersebut turut dihadiri oleh Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota Se-Sumatera Utara. Adapun pesertanya disampaikan oleh Ida Mariana adalah legislatif dan nionberdarra APBN yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2020 senilai

809 miliar rupiah yang tadinya dari usulan pembangunan numurous, namun khusus neleyan, perbaikan numur melalui numur swadaya dan bantuan PSU Perumahan. Sebagai tindak lanjut diikuti desk, akan dilakukan verifikasi kesopanan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020.

Rakorteknologi 2019 dilengkapi dengan dua tahap berdasarkan regional, yaitu regional 1 dan regional 2. Untuk regional 1 terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali yang berlangsung sejak tanggal 25 Februari hingga 1 Maret 2019. Sementara untuk regional 2 terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Papua yang akan dilengkapi di Balikpapan pada tanggal 11 hingga 15 Maret 2019. [dedi]



Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rencana RP3KP Menjadi Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN DOKUMEN KBPU RUSUWANA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA IJK SEI MANIKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MENGABUNGKAN SUMUT BERHARTABAT

March 11, 2019 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Sumut buka Stand di PRSU Tahun 2019



Medan - Dalam rangka mendukung gelaran PRSU Tahun 2019, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu peserta pada ajang tersebut.

Gelaran PRSU yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara pada Jum'at malam (8/3) dengan mengusung tema PRSU Now Lebih Keren Dengan Pesona Sumatera Utara Yang Bermartabat diharapkan menjadi gelaran yang dapat membuat masyarakat senang, sehingga pelaksanaannya tidak boleh main-main.

Dinas PKP Sumut pada gelaran PRSU kali ini menampilkan beberapa foto-foto dan video dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu turut pula di

tampilkan maket pembangunan rumah relokasi korban bencana alam di Siosar dan rencana pembangunan gedung kantor yang mengusung konsep arsitektur hijau.

Dengan gelaran PRSU ini, Dinas PKP Sumut sudah mengambil peran untuk menyampaikan ke masyarakat tentang kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara dan harapannya adalah yang pertama bagaimana agar tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni di Sumut sampai periode Tahun 2023, kedua bagaimana strategi agar masyarakat yang belum punya rumah bisa memiliki rumah serta yang ketiga kebutuhan akan rumah bagi korban bencana bisa diminimalisir dengan adanya pembangunan perumahan bagi korban bencana yang telah dilakukan dan disebarkan oleh Pemerintah, ujar Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Hal itu merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Bapak Gubernur yang pertama untuk mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dan memiliki rumah yang layak huni, ujarnya.

Gelaran PRSU Tahun 2019 berlangsung selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 8 maret sampai dengan 8 April 2019. (dedi)



March 11, 2019 Berita & Kegiatan

Acara PRSU Tahun 2019 Resmi dibuka, GUBSU : PRSU hajatan yang ditunggu-tunggu rakyat, jangan dibuat main-main



Medan - Gubernur Sumatera Utara membuka secara resmi gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2019 di Tapian Daya jalan Gatot Subroto Medan Jum'at malam (8/3). "Acara seperti ini adalah kebanggaan untuk rakyat Sumatera Utara, semua harus senang, saya yakin rakyat dan anak Sumut sangat mendambakan kegiatan seperti ini. Untuk itu yang akan datang harus 4-5 kali lebih baik, tidak boleh dibuat main-main," ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Edy mengajak



seluruh Bupati/Walikota di Sumut untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan PRSU. "Tempat ini harus terawat, harus dibuat tempat yang menyenangkan rakyat, saya rasa bisa, bupati dan walikota ayo kita pikirkan bersama," ujarnya. Adapun tema yang diusung adalah PRSU Now Lebih Keren Dengan Pesona Sumatera Utara Yang Bermartabat.

Pembukaan secara resmi PRSU 2019 ditandai dengan pemukulan Gongdang Sembilan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekprov Sumut Sabrina, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto serta didampingi bupati/walikota se-Sumut. (dedi)

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Ranperda RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPBU RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Ranperda RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPBU RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

March 28, 2019 Berita & Kegiatan

RAPAT LANJUTAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MEDAN

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Raparida RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENyiAPAN DOKUMEN KPBU RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERHARTABAT

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Melakukan Rapat lanjutan sinkronisasi pembangunan kawasan permukiman kumuh kota medan pada hari selesai tanggal 26 Maret 2019 di Aula Kantor Dinas PKP Provinsi. Acara rapat dibuka oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan pelaksanaan rapat sebagai tidak lanjut rapat sebelumnya pada tanggal 19 Maret 2019 yang merekomendasikan Kawasan Mangrove untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekowisata. Pada kesempatan tersebut turut pulang hadir Nurlisia Ginting selaku kepala Departemen Teknik arsitektur Universitas Sumatera Utara yang memperkenalkan beberapa konsep Perencanaan Kawasan dipinggiran Sungai Deli dan sekitarnya.

Selain membahas konsep atau ide-ide perbaikan di kawasan pinggiran sungai deli, dalam rapat tersebut juga membahas perbaikan kawasan Sianang yang akan ditata menjadi kawasan Ekowisata. Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan bahwa sebagai langkah awal akan dilakukan kunjungan lapangan ke Sianang pada hari kamis tanggal 28 maret 2019 yang akan datang, setelah pertemuan untuk kesepakatan pelaksanaan bedah rumah, dengan melibatkan unsur camat, lurah serta mesyayekat. Selanjutnya dibuat design bangunan dengan melibatkan unsur Departemen Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara, tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk penanganan Kawasan Sianang, di samping sebagai tempat objek ekowisata selanjutnya kawasan Sianang nantinya dapat meningkatkan perkonomian masyarakat sekitar jelas Tandi selaku perwakilan dari Dinas PTTR Kota Medan.

Peserta yang hadir pada rapat tersebut diantaranya Bappeda Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Bappeda Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Departemen Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara dan Koordinator Kota Kotaku Kota Medan. (dedi)

March 13, 2019 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Provsu Menyematkan Akrilik Sebagai Tanda Rumah Adat Yang Telah Direnovasi Difungsikan Sebagai Homestay

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Raparida RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENyiAPAN DOKUMEN KPBU RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI
- SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERHARTABAT



Balkara – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi membantu penghuni rumah adat dengan meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni. Rumah adat ini direnovasi agar dapat menjadi homestay. Homestay ini ada berada di Desa Balkara Kecamatan Baliti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan. Ida Mariana selaku Kadis PKP Provsu menyematkan akrilik sebagai tanda rumah ini dapat difungsikan sebagai Homestay senin (11/3). Ida Mariana mengharapkan para penghuni rumah yang telah di berikan bantuan/renovasi rumah adat menjadi homestay supaya di jaga dan dirawat dengan baik. Agar para pengunjung yang datang dapat singgah di homestay menjadi nyaman dan aman, bisa menambah penghasilan bagi penghuni atau pun masyarakat sekitar serta mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama proses pembangunan renovasi ini berjalan dengan lancar. Penerima bantuan pada kesempatan tersebut diwakili oleh Hotlina Balkara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah merehab/memperbaiki rumahnya dan membangun fasilitas kamar mandi dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga kami pun yang tinggal dirumah ini menjadi nyaman, ujarnya. (dedi)

April 7, 2019 Berita & Kegiatan

REI Sumut bersedia merehabiliasi rumah tidak layak huni melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan



Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi menerima Dewan Pengurus Daerah (DPD) Resletstat Indonesia (REI) Sumatera Utara di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019. Rombongan audiensi dipimpin oleh Ir. Andi Atmoko

Panggabean selaku Ketua DPD REI Sumut.

Kebutuhan rumah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan rumah, secara konsisten dalam 3 tahun terakhir REI Sumut sudah membangun lebih dari 50.000 rumah. DPR REI Sumut sebagai salah satu organisasi profesi yang bergerak dibidang penumahan menyatakan komitmen untuk berkontribusi mendukung pembangunan di

Sumatera Utara dalam menuju Sumut Bermartabat. DPR REI Sumut bersedia memberikan dana tanggung jawab sosial untuk merehabiliasi rumah tidak layak huni dan lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Gubernur Sumatera Utara didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Besarin Yunus Terjun dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kepedulian DPD REI Sumut, serta berharap agar segera diambil langkah nyata mengetasi masalah penumahan di Sumatera Utara. Untuk rumah yang akan direhabiliasi dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Pada akhir pertemuan dilakukan Penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPD REI Sumatera Utara untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

April 10, 2019 Berita & Kegiatan

Penanganan Hunian Korban Bencana Alam Dan Hunian Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Dapat Diterapkan Untuk Sebaik-Baiknya Bagi Masyarakat



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Persatuan Daerah (OPD) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Grand Plaza Hotel, Kamis 04 April 2019. Adepuan maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan rincangan rencana dinas penumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan prioritas program dan legistasi yang dihasilkan dari musrenbang RKPD Kabupaten/Kota yang membidaungi unsur penumahan dan kawasan pemukiman, ujar Ida Mariana selaku Ketua Panitia.

Acara dibuka langsung oleh Sabrina, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sabrina mengharapkan pelaksanaan legistasi ini mampu menghadirkan proses penyusunan rencana kerja (rencja) yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen rencana kerja yang semakin berkualitas. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR NO.29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum Dan Penumahan Rakyat untuk peninggalian hunian korban bencana alam dan hunian yang terkena relokasi program pemerintah dapat ditempelkan untuk sebaik-baiknya bagi masyarakat, tembahnya.

Nensumber yang mengisi acara pada kesempatan tersebut adalah perwakilan dari Ditjen Penyedian Penumahan Kementerian PUPR RI, Bappeda Provinsi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Peserta yang hadir berasal dari Bappeda dan OPD yang membidaungi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara. (ded)

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUBARUAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Raporda RPJPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIR DI HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPRI DI RUMAHKA TERIMPLEMENTASI BAGI PEKERJA KEK SEI HANOKKI
- BIKE RIDE BANJARMASIN KUNCI UTAMA MEMBAROKAH SUMUT BERMARTABAT

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUBARUAHAN DITINGKAT PROVINSI
- Raporda RPJPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIR DI HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPRI DI RUMAHKA TERIMPLEMENTASI BAGI PEKERJA KEK SEI HANOKKI
- BIKE RIDE BANJARMASIN KUNCI UTAMA MEMBAROKAH SUMUT BERMARTABAT

April 26, 2019 Berita & Kegiatan

Search

Peduli Anak Yatim Piatu, Dinas PKP Provsu Berikan Bantuan Sembako Ke Panti Asuhan Putra Ar-Ridho



Medan - Dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Utara ke 71 Tahun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan sembako ke Panti Asuhan Putra Ar-Ridho, Jl. Bajak IV, Medan, [22/4]. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas PKP Ida Mariane yang ditemani beberapa orang pegawai.

Kunjungan Ida Mariane disambut langsung oleh Pengurus Panti asuhan Putra Ar-Ridho Semen Sugiantoro.

Ida Mariane mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada sesama masyarakat dengan saling membantu terutama kepada warga yang kurang mampu semestinya untuk mengurangi beban hidupnya.

"Anak-anak yang berada di Panti Asuhan ini butuh kasih sayang dari kita, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli dengan mereka. Saya harapkan dengan bantuan ini dapat membantu mereka dan nantinya saat dewasa kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa," ungkapnya. [dw]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAK MENERIMA PERATURAN PERUNDANGAN DITINJAUKAN PROVINSI
- Raporda RPJKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIRI HARI BANTU PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERSENTASI PENYAPAR DOKUMEN KPBU RUSGAMPAK TERHADAP RABU BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKELI
- SINERGI BAIT BAIK KUNCI UTAMA MEMBAROKAH SUMUT BERMARTABAT



Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAK MENERIMA PERATURAN PERUNDANGAN DITINJAUKAN PROVINSI
- Raporda RPJKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIRI HARI BANTU PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERSENTASI PENYAPAR DOKUMEN KPBU RUSGAMPAK TERHADAP RABU BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKELI
- SINERGI BAIT BAIK KUNCI UTAMA MEMBAROKAH SUMUT BERMARTABAT

June 1, 2019 Berita & Kegiatan

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila Perlu Dijadikan Sumber Inspirasi " Politik Harapan" Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara



Medan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila tanggal 01 Juni 2019 bertempat di halaman Kantor Dinas PKP Prov. Pada kesempatan tersebut berlangsung kegiatan Inspektorat upacara Syahabudin Syegara selaku Sekretaris Dinas dan yang bertindak sebagai Komandan upacara Selain itu selaku Kasubag Program Dan Akuntabilitas Informasi Publik. Peringatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Hari Lahir Pancasila

Sesuai dengan sambutan Kepala BPIP yang dibacakan oleh Syahabudji, melalui Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila Perlu Dijadikan Sumber Inspirasi " Politik Harapan" Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Kita semua harus tahu mengetahui secara konsisten memelihara Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pendirian dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia, tambahnya.

Upacara Hari Lahir Pancasila dihadiri oleh para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf dilingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan dan datu SM/MT Penyediaan Perumahan Provinsi. [ded]



Acara buka bersama dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, Kepala SM/T Penyediaan Perumahan, ASN dan non ASN di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. [ded]



June 10, 2019 Berita & Kegiatan

Mari Kita Terus Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memelihara Moral, Kehormatan, Dan Martabat ASN Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat



Medan - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan apel pagi perdana setelah libur Hari Raya Idul Fitri, senin tanggal 10 Juni 2019. Apel perdana dilaksanakan bertempat di halaman Kantor Dinas PKP Prov. Pada kesempatan tersebut bertindak sebagai pimpinan apel Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ida Mariana, Gubus dan Wagubus menyampaikan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijrah" kepada segenap ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara "Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Dan Bathin". Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan pihak yang jujur membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini menjadi aman, dan berwibawa tentu mendapat ridho dan Allah SWT.

Selanjutnya maria kita tentu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara moral, kehormatan, dan martabat ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, jalan.

Kepada para ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, akan diketahui sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengurangan tunjangan tembahan penghasilan sampai pengenaan hukuman disiplin, tembahnya.

Apel pagi perdana dihadiri oleh Sekretaris, para pejabat eselon III, eselon IV, dan daf dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, pimpinan dan staf SMPT Penyediaan Perumahan Prov. Dikirip seluruh ASN beserta tamu dengan Kepala Dinas dan Pejabat Struktural dilingkungan Dinas PKP Provus. [dedi]



June 26, 2019 Berita & Kegiatan

HALAL BIL HALAL MENJADI MOMENT MENINGKATKAN HUBUNGAN SILATURAHIM DAN SEMAKIN MENINGKATKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA



Medan - Keluarga besar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara halal bil halal yang bertempat di aula Kantor Dinas PKP Sumut, Rabu 26 Juni 2019. Acara ini merupakan agenda setiap Tahun dan bertujuan untuk lebih mempererat hubungan silaturahim antara ASN dan non ASN dilingkungan Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Ida Mariana selaku Kepala Dinas PKP Provus menyampaikan bahwa, halal bil halal menjadi momen meningkatkan hubungan silaturahim dan semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin mempererat pekerjaan dan seluruh ASN dapat bekerja dengan lebih baik lagi, ikhlas dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya agar ASN dapat memberikan inovasi yang benar terkait dengan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan doa, foto dan makan siang bersama. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, SMPT Penyediaan Perumahan Provus dan ASN maupun non ASN dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. [dedi]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MEMBUAT PERATURAN PERUNDUMAN DITINGKAT PROVINSI
- Responi RPPD Menghadirkan Acara Dan Bazar Program Prioritas Pengembangan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BESUT IDA MARINA HADIRI, HARI BAKTI PG KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
- LAKUKAN, PERCEPATAN PENYUPPLY DOKUMEN KPERI KBBI REVISI WORKS TERHADAP BABI BKO PEKERJA KEX BEI MAHKAMAH
- SINERGIANTAS BAKI KUNCI UTAMA MEMBANGUN BUMN BERMARTABAT



July 16, 2019 Berita & Kegiatan

Pembinaan Tenaga Fasilitator Lapangan, Koordinator Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota



Medan – Dalam rangka pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan “Pembinaan Tenaga Fasilitator Lapangan, Koordinator Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota” di Hotel Emerald Garden Medan”, tanggal 11 – 12 Juli 2019.

Dalam sambutannya Kadis Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Ida Mariana Hanapi menyampaikan agar Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator selaku ujung tombol program ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan setiap tugas dan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Pada kegiatan pembinaan ini tenaga fasilitator lapangan, koordinator fasilitator dan tim teknis membawakan rumah, menyusun RAB, memilih/beli bahan bangunan dan lain sebagainya. Dengan bekal pengetahuan ini diharapkan tenaga fasilitator mampu bekerja lebih baik, dan masyarakat dapat menerima hasil pekerjaan dengan senang hati, ujarnya.

Namun pada kegiatan tersebut bersama dengan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi dan Tim Konsultan Manajemen Provinsi. Sedangkan peserta merupakan tim teknis dan fasilitator masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan RTLH. [ded]

Berita Terbaru

- » PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENGURANGI PERATURAN PERUNDANGAN DI TINGKAT PROVINSI
- » Raporda RPJPK Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
- » KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN ISMUT IDA MARINA HADIRI HARI BAKTI PD KE-74
- » FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENERAPAN DOKUMEN KPRI PUSKESMAS TERIKTEGRASI BAGI PEKERJA KEC丹 HARIKELI
- » BIKERGIBAS BAIK, KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT



Search

Berita Terbaru

- » PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA MENYUSUN PERATURAN PERUBARUAAN DITRIBUKN PROVINSI
- » Raperda RPJPKP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- » KEPALA DINAS PERBAHARUI DAN KINERJA PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIRI HARI BAKTI PU KE-74
- » FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LAKUKAN, PERCEPATKAN PENYUARAP DOKUMEN KPBS RUMAHKAH TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KERJA SEI MAKO KEL
- » SINERGIITAS BAIK KUNCITAMA MEMBANTU SUMUT BERMARTABAT

July 19, 2019 Berita & Kegiatan

Bantuan perumahan berbasis komunitas adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan perumahan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)



Medan – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan membuat program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mendukung program tersebut dilaksanakan rapat pembahasan kesepakatan pembangunan baru perumahan berbasis komunitas Tahun 2019 yang diadakan di Grand Mercure Hotel Medan tanggal 18 Juli 2019 dan dihadiri oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota calon penerima bantuan yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai dan Kota Padangsidimpuan.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kadis PKP Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesepakatan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan. Selanjutnya dalam arahannya Direktur Rumah Swadaya menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali dilaksanakan di Gorontalo. Untuk besarnya dana yang diberikan sebesar 35 juta dengan perincian 30 juta untuk belanja bahan dan 5 juta untuk upah kerja, ujarnya. Harapannya agar kegiatan ini sebagai pemicu memunculkan swadaya masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan tersebut, tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan eksposi kesepakatan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan untuk melaksanakan program pembangunan baru perumahan berbasis komunitas. Sedangkan kesokan harinya akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke semua lokasi yang telah diusulkan. (dedi)



Abstracts

Dukungan Electronic Mortgage Management System (e-MMS) Dalam Pemenuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Hedan – Permenhuk No.101/dt.dam/ahm/ir/13 Berminatkan Pekerjaan Bimaan dan Penanaman Banyaknya Permenhuk dan ahm Kapit Koordinasi dalam rangka penanaman Bimaan bagi Hazarrah, Pengembangan pendidikan [Hd 13] oleh Bank Pembangunan Binaan [BPDG] Go-Darmanah melalui Bungkuhan Elektronik Harga-Management System (e-HMS), Janrat [D/2] di Batal Jalan Taman Hedan. Bapak yang diberi Lengkap oleh Gubernur Gamaraha, Bimaan dan Bahanayah dihadiri Insar Berminatkan Pekerjaan Bimaan dan Penanaman Banyaknya, Oktavia Zara dan Saungan, Bank Pengembangan Binaan [BPDG] Gamaraha, Kinas Penanaman dan Sancaan Berminatkan [BPDG] Gamaraha, Asisten Perkebunan dan Pengembangan [BPDG] Gamaraha, Komisi I Pengembangan Binaan dan PC Gamaa, M. Haryo, Penulis PTCH.

Bilamaz ambulanse-Gubemur Eby Fahriyyadim menyampaikan Bantuan rumah sakit di Samarinda mencapai 411.000-unit. Tahun 2012 dan untuk Indonesia ini dibangun 17.670-unit. Bilamaz menyampaikan bahwa dalam mendukung desa dan kota akan berusaha membangun fasilitas kesehatan.

For more information about our work, see our website.

Eljari Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Samarinda FE FE 21 Bis Kepada para penggalahan, realisasi perjalanan dan bantuan pembangunan perumahan PLTP dan sekitar 16,165 juta rupiah [001] tahun 2010 – 2015 memperoleh TTD 100,000 unit rumah dengan anggaran dana Rp 2,814,000.000. Bantuan tahunan 2014, total anggaran yang telah dilaksanakan PLTP, FE, FE 21, Rata-rata 15 Rantau Sungai Muara Dalam 11 M, dan Rantau Samarinda Samarinda Rantau Sungai Muara Dalam 11 M.

Erigga 20 Juli 2018, kata Drs. realisasi perolehan bantuan pembiayaan perumahan selanjutnya sebesar Rp.10.460 triliun untuk 45.656 unit rumah." Bantuan LPPJ dih. 1773 s+Gunaheka per 2 Juli 2018 s+ebanyak 12.550 unit dengan jumlah Rp.7.773 triliun. Rp.10.460 triliun. Rba. 1773

Enggawa diawali Semester IV ETM1101L Elektrostatik, Jenderal Mekanika Instruktural, Perkembangan Ilmiah dan Religian (EJ PR) selanjutnya dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Karena realisasi ini perlu dukungan bantuan pembiayaan yang

permanen di dalam masuk ke dalam optimil. Optimilnya realisasi pembiayaan permanen di dalam, halanya, dapat dilakukan di beberapa faktor diantaranya : ketepatannya pada pembiayaan permanen, faktor adanya data pembiayaan yang valid dan terintegrasi yang dolutuh dengan sistem teknologi informasi ; diturutkan STT II bidang pembiayaan yang masuk ke dalam, kuantitasnya heterogenitas dan diturutkan dari kerentahan Energiis sebagai peringkat 3 ahir, STT II (dari seluruh desa), merupakan sebagai pemangku kepentingan utama (stakeholder desa) di bidang pembiayaan dan kuantitasnya.

Kebutuhan pemenuhan hak pada kota Samarinda adalah sebesar 100% sedangkan pada kota Samarinda sebesar 90%. Dengan demikian pada kota Samarinda masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi sebesar 10% dan pada kota Samarinda sebesar 10%. Pada kota Samarinda jumlah penduduk yang memerlukan air bersih sebesar 1.000.000 jiwa dan jumlah penduduk yang memerlukan air bersih sebesar 900.000 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk yang memerlukan air bersih sebesar 10% dari jumlah penduduk kota Samarinda sebesar 100.000 jiwa.

Pengaruh tanda-tanda kesehatan pada pasien dengan penyakit G1 Hyung terhadap faktor-faktor kesehatan mental pasien.



Brett Johnson

- PERHISIATIKA PENINGGIKAN HEDONISITIS DAN DENGAN PADA MASYARAKAT PENTINGNYA PEMERINTAH BARU
 - Ruspita ISPUH Werdahapati Siregar dan Eko Pramono, Analisis Pembangunan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Persepsi
 - GELOSIA BING PENGHABIB RAHMANI, PERILAKU GELOSIA GE HET (EG HAZIMA BARIEL) BANTENSAH 18-176
 - JOKO GO BOY DI KABUPATEN (POL) LARINI, PERENCANAAN PERENCANAAN BUDAYA SPBBI DEGER BAHAS TERTIB DAN INTEGRITAS PELAKU UMKM GELOSI
 - GELOSIA BING BAHAS GE LESTARI HAMIDAH DAN GELOSIA PERENCANAAN



Search...

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERI PADAMANUSUM PERDANA PERUMAHAN DI TINGKAT PROVINSI
- Rapat Koordinasi Nasional Rencana Dan Dosa Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemerintahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERINTAHAN SUMUT DR. MARINA HADRI, HARI BAKTI PD KE-24
- FORUM GROUP DISCUSSION KPD LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPU DO KUNCI KPR KUSUMAWA TERINTENSIH TAHU PADA KEGIATAN MANAJEMEN
- GIGERISITAS BANK KUNCIUTAMA MEMORANDUM MUTU BERMARTABAT

Rabu, 08 Agustus 2019

Bank Sumut Menjadi Tujuan Masyarakat Untuk Mewujudkan Impian Mereka Agar Bisa Memiliki Rumah



Hedan – Kadis PKP Provinsi Ida Mariana Menghadiri Acara promosi dan sosialisasi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembayaran perumahan (KPR FLPP) yang di selenggarakan oleh Bank Sumut dan bekerjasama dengan Kementerian Perhutani Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Aula Gedung Bank sum ut. Jl. Imam Bonjol, Medan kamis 8 Agustus 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat OJK Yogi Suksander, dan Seluruh Jajaran Bank Sumut serta para pengembang Perumahan. Pembukaan acara dilakukan oleh Pimpinan Divisi Risk Bank Sumut Syafrial Syah. Dalam sambutannya mengharapkan agar acara ini berlangsung lancar dan Bank Sumut menjadi Tujuan Masyarakat untuk mewujudkan impian mereka agar bisa memiliki rumah. Pada kesempatan tersebut, Kadis PKP Provinsi berharap Bank Sumut menjadi Pionir dalam program pemerintah sebagai tempat fasilitasi bagi masyarakat yg ingin memiliki rumah dengan KPR yang ringan.

Penjabat dari kementerian PUPR dihadiri oleh Alisnurif mewakili bsgm divisi pemasaran. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rumah sejektif yang dibayai KPR sejektif FLPP dalam kondisi Bdg, Sehat, dan Layak Huni yang meliputi, Atap, Isolasi, dan dinding serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan, kesanaman dan kehandalan bangunan. Selain itu terdapat jaringan distribusi air bersih pipisan dari PDAM, Utilitas jaringan listrik, jalur lingkungan yang sudah dalam perlengseran badan jalan, seluruh fasilitas lingkungan. Adapun standar rumah sejektif KPR maksimal tipe 88 dengan luas tanah minimal 100 m², tambahnya.

Di akhir acara dilakukan pengundian Luckdraw dan foto bersama. (ded)



Medan, 2019 Berita D. Regulasi

Masyarakat Mendukung Normalisasi Sungai Badera



Medan – Dalam rangka pelaksanaan pilot project normalisasi Sungai Badera, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Balai Besar Sungai Wilayah II Sumut dan Kodam I Bukit Barisan melaksanakan sosialisasi Rencana Normalisasi Sungai Badera dan Relokasi Warga bertempat di Balai Prajurit Medan I Bukit Barisan, Jum'at, 09 Agustus 2019.

Acara dipimpin oleh Asisten Teritorial (ATER) KABDAH VBB. Pihaknya berpungsi yang menyampaikan bahwa salah satu permasalahan di Kota Medan adalah terjadinya banjir. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan dalam menjaga kebersihan sungai dan saluran serta terjadinya pembangunan

yang berada pada sempadan sungai serta terjadinya sedimentasi dan penyempitan badan sungai yang salah satunya adalah Sungai Badera. Oleh sebab itu akan dilakukan pilot project penanganan Sungai Badera, imbuhnya. Diharapkan adanya kerjasama dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang terkena dampak normalisasi Sungai Badera agar legistasi ini berhasil dengan lancar, tambahnya.

Ketua PKP Provinsi Ida Mariana pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini diharapkan akan ada solusi yang terbaik untuk penanganan Sungai Badera. Acara ini merupakan tindak lanjut dari acara awupun rapat sebelumnya. Dan bagi masyarakat yang terkena dampak akan dilakukan penilaian secara oleh tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Oleh sebab itu masyarakat diharapkan segera melengkapi dokumen awupun surat tanda bukti kepemilikan tanah. Sebagai tindak lanjut, setelah pertemuan ini pada tanggal 14 Agustus 2019 akan dilakukan Ground Breaking Normalisasi Sungai Badera di Kawasan Perumahan Bumi Acri.

Masyarakat pada prinsipnya mendukung legistasi Normalisasi Sungai Badera ini, namun meminta agar proses genting rugi tidak terlalu lama dan tidak merugikan masyarakat yang terdampak legistasi ini, agar beberapa warga yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Acara diakhiri dengan pengumuman dokumen/surat kepemilikan tanah masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan vs lidaia atas masyarakat yang mengusulkan tanah. Turut serta menghadiri acara tersebut, Bappeda Provinsi, Dinas Bina Masyarakat dan Tata Ruang Provinsi, Kanwil ATR/BPN Sumut, Bappeda Kota Medan, Dinas Perkim Deli Serdang, Dinas PUPR Deli Serdang, Koremil, Babinsa, Camat Melati, Kantor Jasa Penilai Publik dan masyarakat yang berada di lokasi Normalisasi Sungai Badera. (ded)



Baru

Search

Berita Terbaru

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Beri Pujuk Menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Rencana dan Desain Program Prioritas Pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Perniagaan
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Hadiri Rapat Koordinasi di Aceh
- Focusing Group Discussion (FGD) Lanjutkan Percepatan Penyampaian Dokumen Kebijakan Kawasan Terintegrasi Dioperasionalisasi Wilayah
- Gubernur Sumut Beri Kucuktama Mengarungi Sumut Berkarya



August 16, 2019 Berita & Kegiatan

Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana ikut andil dalam peringatan HUT RI Ke 74 Tahun



Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana jadi Juri memasak

Medan - Dinas PKP Sumut bersama menyambut hari Kemerdekaan RI Ke 74 Tahun dengan berbagai macam perayaan. Untuk memeriahkannya, Panitia mengadakan perlombaan di antara nya lomba Balap Kanung, Lomba kelengkeng didalam sendok, bulu tangkis, memasak dan lainnya.

Pelombaan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas PKP Sumut tersebut dimulai tanggal 14 – 15 Agustus kemarin, di ikuti oleh seluruh pegawai Dinas PKP Sumut.

Tujuan panitia mengadakan perlombaan adalah menciptakan kebersamaan tanpa memandang etnis, golongan, jabatan, dan agama tentunya menyampaikan pesan moral tentang perjuangan para pahlawan yang telah berjungg memperdekan bangsa ini.

Dalam perlombaan memasak, Kadis Dinas PKP Provsu Ida Mariana Mengambil Andil dari perlombaan tersebut yaitu sebagai Juri memasak. Pelombaan yang diedekan tersebut menyajikan momen kebanggaan tersendiri untuk para peserta, berikut momen : [ded]



August 17, 2019 Berita & Kegiatan

Sumber Daya Manusia Sebagai Pilar Penting Penopang Pembangunan



Medan - Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 74, Dinas PKP Provinsi melaksanakan upacara bendera yang diebekan di halaman kantor Dinas Sbtu (17/8). Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Ida Mariana selaku Kepala Dinas dan Komandan Upacara oleh Darinto Bangun.

Dalam sambutan Gubsu yang dibacakan oleh Ida Mariana menyampaikan bahwa ikhtihah terpenting dalam memperingati kemerdekaan kita harus dapat melestarikan dan melaanjutkan nilai-nilai kejuringan para pahlawan guna mengisi kemerdekaan dan melaanjutkan program pembangunan.

Pada penyambutan 74 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini mengambil tema "SDM Unggul, Indonesia Maju". Tema ini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai pembangunan suatu daerah atau negara, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut diucapkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun, XI Tahun dan XII Tahun kepada para ASN yang telah berbakti secara tulus menuju dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, ketekunan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi ASN lainnya. [ded]

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MASYARAKAT PERUMAHAN DAN KAWASAN PROVINSI
- Raporte RPKP Mengalih Akum Dan Desar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perumahan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BEMUT IDA MARINA HADIRI HARI BAKTI PU KE-74
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTKAN PERCERAMAN PENYAPUAN DOKUMEN KPPB RUBUKWAH TERIKETOBATI DAN PEKERJA KEX SEI MAROKO
- BIKERQINAS BAIK KUNCI ETNAK MEMBAROKAH SUMUT BERHARTABUD



Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MASYARAKAT PERATURAN PERUBAHANAN DITINGKAT PROVINSI
- Perppda RPBK Prov. Sumut Acuan Dasar Program Prioritas Pembangunan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IBD MARINA HADIRI HARI BAKTI PU KE-74
- FOOD&GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAK, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPRI RUSUWAH TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANOKWE
- SINERGIITAS BAIK KUNCII UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT

August 22, 2019 Berita & Kegiatan

Normalisasi Sungai Bedera sebagai Bentuk Tindak Lanjut Penanganan Banjir Di Kota Medan



Medan – Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi memimpin langsung Groundbreaking normalisasi Sungai Bedera yang berlokasi di Komplek Perumahan Bumi Aeri. Acara diawali dengan laporan dari Kepala BWS Sumatera II Roy P. Perdede. Makna dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengungkap permasalahan banjir yang ada di Kota Medan yang selesahtunya adalah normalisasi Sungai Bedera. Adapun pekerjaan yang dilakukan sepanjang ±3.500 meteryang dimulai dari Jalan Gatot Subroto ke hilir dengan menggunakan alat berat berupa excavator.

Dalam sambutan dan arahan dari Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi

menyampaikan bahwa pelebaran sungai ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan karena Kota Medan sering mengalami banjir pada waktu musim hujan yang dampak kerugian mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah. Sungai berfungsi mencegah kerusakan manusia, karena itu sungai harus dibersihidari sekam, tambahnya.

Diekhir acara dilakukan pengorekan sungai Bedera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut. Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Medan, Wakil Bupati Deli Serdang, Kadisdik I Bukit Barisan, para pimpinan OPD, Camat, Lurah serta masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bedera. [dedi]





Grafik berita_2012 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Sumut Berkomitmen Melakukan Keterbukaan Informasi Publik



Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana di dampingi Kasubag Program Selmarisno melakukan presentase yang terkait dengan heterbukan informasi publik di Hadapan Komisioner Provinsi, Selasa (8/9) di Kantor Komisi Informasi Provinsi. Kegiatan ini memindahkan uji UU No. 15 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa heterbukan informasi publik merupakan sanksi dalam menggantikan pengawasannya publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segera sesuaikan dengan kebutuhan publik.

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi melakukan presentase yang terkait dengan heterbukan informasi publik di Hadapan Komisioner Informasi Provinsi, Selasa (8/9) di Kantor Komisi Informasi Provinsi. Kegiatan ini memindahkan uji UU No. 15 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa heterbukan informasi publik merupakan sanksi dalam menggantikan pengawasannya publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segera sesuaikan dengan kebutuhan publik.

Presentase langsung dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana. Dalam Pemaparannya Ida Mariana Mengatakan dalam heterbukan informasi publik, “ kami selalu menyampaikan informasi-informasi apa saja yang berkaitan dan yang telah dilakukan Dinas PKP Provinsi Kepada Masyarakat baik secara lisan ataupun dalam bentuk media informasi lainnya berupa booklet dan Brosur.

Berakiran dengan penyampaian Ida Mariana, Komisioner Informasi mengatakan bahwa Dinas PKP Provinsi atas heterbukan informasi publik. [ded]

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERI PENGARUH DENGAN PERATURAN PERMUDA KOMITMEN DITINGKATKAN PROVINSI
- Rapat Koordinasi Pengembangan Dasar Program Prioritas Penilaian dan Diklat dan Penilaian dan Kewajiban Perwakilan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIRI KARIBATIFU KE-24
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN DOKUMEN KEDUASAMA
- TERINTEGRASI DAN PERERAKER KEGIATI
- SIKERISITIS BAIK DI SUMUT BERBANTAH



Selanjutnya Berita & Kegiatan

Kemudahan Perijinan Sebagai Upaya Percepatan Pengurangan Backlog



Medan – Dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penyederhanaan pembinaan pembangunan perumahan bagi masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bapak Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi terpadu dan pendampingan percepatan penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan MBR kepada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/9) di Hotel Santika Medan.

Acara disabali dengan isapan oleh Rizaldi selaku ketua panitia. Dalam sambutannya Rizaldi mengatakan bahwa maksud kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting sebagai wujud perhatian dan keseriusan

Pemerintah terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan melalui perijinan dan non perijinan di sektor. Sedangkan tujuannya adalah untuk memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam rangka penyelesaian pemberian kemudahan perijinan bagi perumahan MBR, hal ini sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR dan Permendagri No.55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perijinan Dan Non Perijinan Pembangunan Perumahan Perumahan Bagi MBR di depannya. Diharapkan melalui kegiatan ini segala permasalahan yang ada di Kab/Kota dapat tersampaikan dan terselesaikan dengan baik, tanpa hambatan.

Hewi Killi Gubazu, Ida Mariana selaku Kadis PKP Sumut, menyampaikan permasalahan perumahan yang ada di Sumatera Utara, jika dirinci sampai dengan Tahun 2018 total backlog di Sumatera Utara berjumlah 4.111.846 unit. Belum lagi adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Semua itu bisa ditutis apabila kita semua mempunyai komitmen yang kuat serta didukung oleh semua pihak. Dan kita semua harus ini berkumpul sebagai tanda komitmen kita bersama bagaimana sumatera utara supaya jangan ada lagi backlog. Bebagai upaya lain untuk mengatasi permasalahan backlog di Sumatera Utara, pada Tahun 2019 sedang merintis program Bantuan Rumah Berbasis Komunitas dan Inisiatif Allah akan dilakukan ground breaking pada Bulan November ini, tanpa hambatan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi, Bupati Batubara, Wakil Walikota Tanjung Balai dan para Kepala OPD Kabupaten Kota yang di undang. (dedi)

Search ...

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERI PERMINTA MAUZUH PERATURAN PERUNDANGAN DITINGGALI PROVINSI
- Raporda RPJPD Marpela & Rokan Daya Dasa Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perniagaan
- KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN KEMERKAMAN PEMERINTAH SUMUT IDA WAKIL KABUPATEN, WAKIL BUPATU KE-24 FOKUS GROUP DISCUSSION (FGD) UMKUM, PERCEPATAN PENYEDERHANAAN KEPADA KEBIJAKAN PUPR SUMUT
- TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEGIATI KARYAWAN
- GIMERON ITS BAIK KUNCIUTAMA MEMERIODIK SUMUT BERNARTABAT





Seputar berita, 2018 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Sumut Berpartisipasi Dalam Acara Hari Keluarga Nasional Ke XXVI Provinsi Sumatera Utara



“Lebih bagus n. Rumah juga jangan seperti pasar yang riuh karena komunitasnya tidak nyambung”, tambahnya.

“Di meja makan anak bisa mengeluskan keluarga besarnya. Sementara orang tua memberikan hasilnya langsung” kata Edy yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut, Herval Eddy Rahmayadi.

Pada kesempatan tersebut, Kadis PKP Sumut, Ida Marissa menyampaikan bahwa Keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan sehingga pembinaan baik bersewal dari rumah yg layak sehingga untuk membangun masyarakat Sumut yg bermartabat, Pemerintah wajib menyediakan rumah yg layak huni plus untuk masyarakat”. Untuk menjawab itu Dinas PKP Sumut memberikan bantuan bedah rumah untuk keluarga yg tidak mampu, ujarnya.

Di akhir acara Edy Rahmayadi meresmikan rumah yg telah di bedah secara simbolis dengan memotong pita. (ed)

JABURA – Gubu Edy Rahmayadi menghadiri Puncak penyalaan Hari Keluarga Nasional (Hargnas) XXVI Tingkat Provinsi Sumut, di Lapangan Sepakbola, Aek Kota Batu, Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (3/9).

Dalam sambutannya Edy Rahmayadi mengatakan “Keluarga keluarga ku jihid, penuh perjuangan namun harus tetap disiplin sebab keluarga adalah benteng pertama yang harus dijaga dalam masyarakat,” ujarnya, kepada masyarakat yang hadir saat itu.

Eddy juga mengajurkan agar dalam Keluarga diharuskan saling berkomunikasi, ibarat rumah tangga jangan seperti kuburan. Di kuburan ku sepi dan sunyi. Rumah juga jangan seperti di rumah sakit yang selalu kurang



Search...

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERI PAPAR NYUGUR PERITURAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Respon RPPDP Mengikuti Acara Dua Dinas Pjogon Pjok dan Pembangunan Di Balang Perumahan Dua Kawasan Pjok & Dinas
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PENGETAHUAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARILLA HADIRI HARI BAKTI PDIP KE-24
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYAPUAN DI KUNCI KEBU RUGI URAWA TERITTORI DALAM PELAKU KEGIATAN MANGKEI
- SINERGI DENGAN BRIK KUNCI URAWA MEMBANTU SDM MELAKUKAN KEGIATAN



Gedung baru, 2012 (Foto: D. Regulasi)

Tempat Belajar Tidak Boleh Kotor Karena, Lingkungan Yang Kotor Dapat Mengakibatkan Para Santri Jadi Sakit



Tempat belajar tidak boleh kotor. Karena, lingkungan yang kotor dapat mengakibatkan para santri jadi sakit.

"Benih, bukan hanya bersih orangnya, melainkan lingkungannya juga, kebersihan juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para guru menyampaikan agar disediakan truk pengangkut sampah, karena belum tersedianya fasilitas pengangkut sampah. Selanjutnya Edy memerintahkan agar diupayakan truk pengangkut sampah untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. (ded)

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUJI CAMPUR MENYUSUL PERATURAN PERUNDANGANAN DITINJAU PROVINSI
- Rapporta RPdKP Mewujudkan Komunitas Desa / Program Pilar Desa Pembangunan Di Bidang Permakahan Dan Kawasan Pemukiman
- REPROD. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN SUMUT IDA MARINA HADIRI HARI BAKTI PID KE-24
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LAKUKAN, PERSEPTIF PENYAPUAN DOKUMEN KPED RUGU NAMPA TERIKTEGRASI BAGI PEKERJA KEGIATI MANGKEI
- SINERGI ITAS BAIK KUNGUTAMA MENGADU NGUH MUTH BERBANTAH



Sumber berita 14_2018 Berita 2_Kegiatan

PPIID Merupakan Garis Terdepan Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat



Kedua – Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan visitasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PKP Provinsi Beni (18/9). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengisian Quisioner Penerapan Keterbukaan Informasi Publik secara Mandiri (Self Assessment Questionnaire) dan presentasi Kadis PKP Provinsi tentang Penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh Kepala Dinas PKP Provinsi di Kantor Komisi Informasi, selasa (18/9) yang lalu. Kegiatan visitasi ini sebagai penilaian terhadap OPD yang masuk 10 besar grand final Hari Keterbukaan Informasi Nasional.

Dalam visitasi ini Komisioner yang dipimpin oleh Eddy Syahputra disambut dan didampingi oleh Tim PPID Pembantu Dinas PKP Provinsi yang dipimpin oleh Beslida Bahnevati. Pada kesempatan tersebut, Komisioner mendapat informasi dan melihat langsung Buku Tamu Dinas, Formular Permohonan Informasi dan Ruang Penerimaan Tamu.

Beslidi melukiskan peningkatan, beberapa masukan dari Tim Komisioner Informasi Provinsi adalah petugas PPID harus mempunyai kecenderungan dan pengertian terhadap dengan peraturan yang berlaku, agar paparan informasi dibuat lebih bagus dan lebih informatif, perlu diberikan kursi untuk tamu yang memerlukan informasi, dan yang terakhir KIP bersedia untuk memberikan training kepada petugas PPID untuk tata cara penyampaian terhadap masyarakat. PPID merupakan garis terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, ujar Eddy Syahputra. Sehingga PPID diharapkan bukan hanya bermisi namun harus menguasai pengetahuan perundangan yang berlaku terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, tambahnya.

Kegiatan visitasi diakhiri dengan sesi foto bersama tim Komisioner Informasi Provinsi dengan PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi. (ded)

Search

Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERI PAPARAN YANG DILAKUKAN PADA KEGIATAN PENGANTAR DITINGKAT PROVINSI
- Komisioner KIPPPW Wawancara Acara Dan Dua Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perkotaan
- REPUKA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDR MARLINA HADIR DI HARI BAKTI PU JELLINE
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAKUTAN, PERSEPARAHAN PERKEMBANGAN KUHEN KEPERDIDUGUAN HAK HAMAN TERINTEGRASI DALI PEKERJA KEGEI MANOKWARI
- GIGERISITING BNI KUNCHUTKMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT



Search... Search

Berita Terbaru

- » PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUJI CAMPUR MELAKUKAN PERUTUSAN PERUNDINGAN DI INSTITUT PROVINSI
- » Responsi DPRD Menghadiri Rapat Dasar Dua Daerah Program Pisa-Pisa Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perusahaan
- » KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IED MARINA HADIRI HARI BULUTPU KE-24
- » FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAN, PERSEPATAH PENYAPUAN DOKUMEN KBUD RUGI HARR TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEGIATI MARGAII
- » GINKGO BIUS BAIK EDUKASI DAN PEMBANGUNAN SUMUT BERKARYABIK

Selain berita, ada Berita & Kegiatan

Dinas PKP Provsu Sambut Kedatangan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Perumukiman menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di ruang rapat Kantor Dinas Jalan AH Nasution selasa (17/9). Rombongan anggota DPRD KabTeng dipimpin oleh Asisten Bapak Bendi Simanullang A.Hd, serta beberapa anggota DPRD yakni Ir. Sya'ruddin Simatupang, Ir. Herniungah Simabaton, Penghulu Sibotsing, Sibol Marudut, Siregar, Serbon Tus Limbong, dan Tulus Huta Ibat, SE.

Pada kesempatan tersebut Asisten Bapak Bendi Simanullang yang juga merupakan wakil ketua DPRD meminta penjelasan terkait penyediaan sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada perumahan – perumahan yang berembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain kujuga meminta informasi bagian – bagian apa saja yang dapat dilokasikan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sebagai bentuk dukungan, DPRD akan mendorong Pemkab untuk mempersiapkan usulan dan penyedian lahan nya, ujarnya.

Urusan perumahan dan Kawasan permukiman dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota . Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai aman distur dalam PP 2/2018, Permendagri 100/2018 serta PermenPUPR 29/2018, agar hasil Zuhri selaku penyelesaian dari Dinas PKP bermutu.

Bedangan untuk penganginan Kawasan rumah kewenangan pemerintah adalah LO g/d LO Ha, agar pemkab Tapteng memperbaiki kawasan rumah, sehingga dapat diketahui sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, tambahnya. Kepada DPRD kab. Tapteng juga diminta untuk melaksanakan pengawalan penyusunan dokumen perencanaan perumahan jangka panjang pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pembustan Perda RPBD, ujarnya menutup diskusi.

Kesia diakhiri dengan melakukan sesi foto bersama antara pihak Dinas PKP Provsu dengan anggota DPRD Kabupaten Tapteng. (ded)

Search Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAKA MEMBUKA PELATIHAN PERUNDANGAN DITINGKAT PROVINSI
- Rapport RPDKP Mewakili Acara Dan Dua Program Prioritas Pengembangan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARINA HADIEL HARI BAKTI PU KE-74
- FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) LANJUTAK PERCEPATAN PERKIRIAN DOKUMEN KPRB RUMAHAN TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MAROKKEI
- BIMERO ISBAT BAIK KURSI UTAMA MENJALANI SUMUT BERHARTABAF

September 27, 2019 Berita & Kegiatan

Sumut Menjadi Salah Satu Tuan Rumah Gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX)

Medan – Gubu yang diwakili oleh Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi membuka secara resmi gelaran Indonesia International Property Expo 2019 (IIPEX) di Atrium Plaza Medan Fair, Rabu (25/09). Gelaran ini merupakan pameran properti terbesar di Indonesia yang dihelat sekalak di 4 kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan yang menampilkan produk-produk perumahan terbaik dari developer-developer berkualitas.

Sumatera Utara mengambil peran dalam acara Indonesia International Property Expo 2019 yang artinya bagaimana menyatakan Sumatera Utara bisa berpartisipasi, berpartisipasi dalam

artian memiliki rumah yang layak huni. Oleh sebab itu Pemerintah perlu bekerja sama dengan Real estate Indonesia (REI) agar kebutuhan rumah untuk masyarakat bisa terpenuhi, ujar Ida Mariana. Jedikannya semua pembangunan rumah, baik rumah untuk masyarakat yang kurang mampu maupun rumah komersial agar diperlakukan dengan penjinian dan kepemilikkannya. Saya berharap kepada para investor dan pengembang baik yang sudah menanamkan modalnya maupun yang belum, melalui legislatif ini untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara, karena saat ini Sumatera Utara masih butuh banyak rumah, tambahnya mengakhiri sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan pemukulan alat musik tradisional tageling sebagai tanda dibukanya acara Indonesia International Property Expo 2019. Acara ini dilepas sekitar 5 hari mulai tanggal 25 s/d 29 September 2019. Acara ini juga dihadiri oleh, Rei, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BJB, Penumnes dan kurang lebih 200 pengembang dibidang property. (dedi)



04 Oktober 2019 Berita & Kegiatan

Dinas PKP Provsu Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila



Medan – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bertempat di halaman Kantor Dinas, selasa (1/10). Bertindak sebagai inspektur upacara Herbol Ananda Pulungan selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan sebagai Komandan Upacara Haimul Ahmad Rangkuti selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan.

Upacara diikuti oleh segenap pejabat eselon III dan IV, serta ASN dan Kontrak di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dan pimpinan, staf BAKTI Penyediaan Perumahan Provsu. (jed)

Search... Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MASYARAKAT PERUMAHAN PERUMAHAN DI BIDANG PEMERUMAHAN DITINGKATKAN PROVINSI
- Raporda KPKP Merpati Raya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Perumahan dan Kawasan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDR. MARIBKA HADRI, HARI BURUPTO KE-IN
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UNJUTAN, PERSEPATAN PENYODAHLAN DAN RUMAH KUKUH UNTUK TERINTEGRASI DAN PENERIMA KEGELIHAN
- SINERGITAS BAKTI KUKUH UNTUK MEMBANGUN SUMUT BERKARAKTER



04 Oktober 2019 Berita & Kegiatan

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019



MEDAN – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pembiasaan Infrastruktur Kementerian PUPR Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiasaan Perumahan Tahun 2019, di Hotel Grand Mercury Medan, Kamis (24/10).

Rapat dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah di Provinsi Sumatera Utara dan strategi untuk mengatasinya. Pemerintah juga gencar dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman dengan melibatkan peran semua aktor pembangunan serta membuat hasil dan berbagai instrumen yang dibutuhkan yang meliputi peraturan pelaksanaan, dokumen perencanaan, basis data, pendanaan dan sistem pembiasaan, ujar Herbol Ananda Pulungan selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mewakili Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bertujuan melalui rapat koordinasi ini, pemerintah bisa puas, maupun devisa, serta semua stakeholder seperti perbankan dari si pembiasaan, sasaran dan pengembangan perumahan subsidi dari sisi supPLY dan MBR sebagai tujuan akhir, dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pembiasaan perumahan, pemanfaatan hunian dan hasilnya rumah bersubsidi yang layak huni, tanpa bantuan.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiasaan Perumahan Tahun 2019, dibidri oleh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Bank BTK, REI, dan beberapa developer lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Search... Search

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPA MASYARAKAT PERUMAHAN PERUMAHAN DI BIDANG PEMERUMAHAN DITINGKATKAN PROVINSI
- Raporda KPKP Merpati Raya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Perumahan dan Kawasan
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDR. MARIBKA HADRI, HARI BURUPTO KE-IN
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UNJUTAN, PERSEPATAN PENYODAHLAN DAN RUMAH KUKUH UNTUK TERINTEGRASI DAN PENERIMA KEGELIHAN
- SINERGITAS BAKTI KUKUH UNTUK MEMBANGUN SUMUT BERKARAKTER

Rabu, 04 April 2018 Berita & Kegiatan

Search

Kadis PKP Sumut Meninjau Korban Kebakaran di Sentosa Lama



Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Beli Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Benin (JL/LD) yang lalu, Menyisihkan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Bebagian warga sudah hadir yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana Harahap mendatangi para pengungsi di tenda-tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi.

"Saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal di kenda-kenda pengungsian ini", disampaikan salah seorang korban kebakaran saat bertemu dengan Ida Mariana.

Welikst, kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut, Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan tempat hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut kepala dinas juga mensyaratkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang saatnya akan dibagikan secara merata kepada para korban.

Medan – Pasca terbakarnya puluhan rumah di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Beli Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Benin (JL/LD) yang lalu, Menyisihkan Puing-puing bangunan yang hangus tak bersisa. Bebagian warga sudah hadir yang mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara sebagian besar korban kebakaran terpaksa masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh relawan. Berbagai bantuan dari elemen masyarakat dan pemerintah telah disampaikan kepada para korban.

Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati Kepala Dinas PKP Provinsi Ida Mariana Harahap mendatangi para pengungsi di tenda-tenda pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Warga menyampaikan kondisi mereka saat ini kepada ibu Kadia.

"Saya tidak ada apa lagi untuk membangun rumah saya kembali, saat ini dan seterusnya saya akan tetap tinggal di kenda-kenda pengungsian ini", disampaikan salah seorang korban kebakaran saat bertemu dengan Ida Mariana.

Welikst, kondisi pengungsi yang termasuk masyarakat kurang mampu tersebut, Ida Mariana menyampaikan bahwa masyarakat korban kebakaran tersebut akan difasilitasi mendapatkan tempat hunian baru.

Dalam kesempatan tersebut kepala dinas juga mensyaratkan bantuan sembako melalui posko kebakaran yang saatnya akan dibagikan secara merata kepada para korban.



Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERPUKU MENGUNDUR PERATURAN PERMUDAHAN DITINGGAL PROVINSI
- Rapat Koordinasi Pengawas dan Inspektorat di Bidang Pemukiman dan Kawasan Publik
- KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HARAHAP HARI INI PTU KE-24
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KAJUJUK, PERCEPATAN PENYAPUH DOKUMEN KEBUDAYAAN TRADISIONAL BAGI PEKERJA KEGIATI MANGKEI
- SINERGI ITB BUKIT KALI UTAMA MENGADAKAN SUMUT BERARTIBU

November 04, 2019 Berita & Kegiatan

Search... Search

Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar



Komandan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019

Medan – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas PKP Provinsi melaksanakan upacara bendera yang diadakan di halaman kantor Dinas Lingkup (LO/LI). Yang bertindak sebagai inspektur Upacara yakni Heri Sulanso selaku Pelaksana Sekretaris Dinas dan Komandan Upacara oleh Derianto Bangun.

Bersama hari Pahlawan, kita diingatkan kembali kepada perjuangan pertemuan LO November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut, rakyat bersatu padu, berjuang, pertanggungjawab, melalui perjuangan yang ingin mencapai kembalikan kebhinekaan di Indonesia, ujar Heri membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Dengan peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Father kita, Bung Karno yang menyatakan bahwa “Hanya Bangsa Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dapat Menjadi Bangsa Yang Besar”. Adapun tema peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 adalah “Aku Pahlawan Masa Kini”, yang mempunyai makna menjadi Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga negara Indonesia, dalam bentuk aktivitasnya memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain sebagainya, termasuknya.

Upacara Hari Pahlawan dihadiri oleh para pejabat eselon III, eselon IV, dan staf dilingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta pimpinan dan staf BKVT Penyedian Perumahan Provinsi. (ded)



Raserta Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019

Berita Terbaru

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUJI CITA MENYUGUNKAN PERITURAN PERUNDINGAN DITINGKAT PROVINSI
- Raporda RPJPD Beraupla pada Rencana Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Perindustrian
- KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIBAH HADIRI HARI BARTI IPD KE-24
- RAPOR GROUP DISCUSSION (RDG) LAMUTUK, PERSEPAKAN PENYAJIAN DOKUMEN KPBUD RUGIUMAN TERIMBORGIGI BAGI PEKERJA KERJEL MANGKEI
- SINERGIISME BUKI KUNCI UTAMA MENGABUNGKAN DAN BERKREDITBANTU



8 months USA, CHINA India, 9 Days, 6 hrs

PENGEMBANG SUMATERA UTARA BERHENTI BANGUN RUMAH SUBSIDI



Pangsheng 2 orches there
yang long cheng di (E) 1 Real
Eduardo 2 orches there das Aquarii 1 Areal
Perecasa 2 orches
Isidoro 2 orches there
hermanas das espalhas
Igor 2 Realpa 1 es
Perecasa 2 orches
Perecasa 2 orches there
Wile Mariano 2 2 ideas
se re 1 Realpa 1 Realpa
the a PPP 2 orches there
hermanas 2 orches
Aguilera 2 hermanas 1 Realpa
hermanas 1 Realpa

Wet Nederlands voor de arbeid en arbeidswetgeving, gepubliceerd 2000-2002 en later. Deze wetten zijn ook te bekijken op de website van de Nederlandse overheid (www.wetten.nl). De Wet arbeid en arbeidswetgeving (WAAW) is een speciale wet die de arbeidswetgeving moet aanpassen aan de wijzigingen die in de arbeidswetgeving door de arbeidswetwetswijziging (AWW) zijn aangebracht.



2. ช่องทางการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่น
ในสังคมไทย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มี 223
หน่วยงาน ที่มีบุคลากร 4,000 คน และสื่อโทรทัศน์
ที่มีสถานี 10 แห่ง ที่มีบุคลากร 1,000 คน
และสื่อออนไลน์ ที่มีผู้ใช้งาน 200 ล้านคน
และสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีผู้ใช้งาน
100 ล้านคน ที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย
และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีบุคลากร 223
แห่ง ที่มีบุคลากร 4,000 คน และสื่อโทรทัศน์
ที่มีสถานี 10 แห่ง ที่มีบุคลากร 1,000 คน
และสื่อออนไลน์ ที่มีผู้ใช้งาน 200 ล้านคน
และสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีผู้ใช้งาน

Menurut M.H. Taha dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an dan Kebudayaan Islam*, bahwa pengaruh Al-Qur'an pada kebudayaan Islam terdiri atas dua bagian, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membentuk karakter dan nilai-nilai moral dan spiritual manusia. Pengaruh tidak langsung berasal dari pengaruh yang diberikan oleh sejumlah ahli ilmu dan ulama yang memperkenalkan dan mempopulerkan Al-Qur'an di kalangan masyarakat.

Die oben genannten von der Kasse 2 verliehenen Sonderausgaben waren jedoch durch die eigene Kasse wieder eingezogen worden und so kam es zu keinem Verlust.



APBD yang tidak berjalan sesuai dengan program prioritasnya akan membuat PPKD berjalan secara tidak efektif dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan.



Journal of Oral Rehabilitation

SINERGISITAS BAIK KUNCI UTAMA MEMBANGUN SUMUT BERMARTABAT



Heiden - "Pembangunan kawasan terintegrasi
Heideng ini merupakan salah satu upaya untuk
menyelesaikan visi Presiden Jokowi," kata Iman Iskandar
Presiden prioritas pembangunan GII saat dalam
kunjungan pemimpin daerah ke rumah makan
Lapangan Kerja, rektor UI Bandung, Prof. Dr. Ir. Heru Herjati
za dan, mengingat pembangunan infrastruktur Jadi,
Heideng merupakan salah satu upaya

Balai Studi dan Pengembangan Gubernur Sumatera Barat
[BSPG] Bdg. Bahmawiyah sejakt membubuhkan Pendaftaran
Group Ko-kozation [PKB] Benihana Program
Penanaman benih tanaman dalam kemasan plastik

Angaben der Autoren / Angaben der Herausgeber

Balai dan arsitekturnya, Gubernur juga mengajak para pembangunan haruslah beriringan. Helis Sargeo ini merupakan salah satu ahli arsitektur yang mendapat visi Presiden Jokowi. Selain itu ia instruksikan Presiden, prioritas pembangunan CBI ini ejek dalam kemandirian, pemerasalahan investasi dan untuk memperbaiki lapangan kerja, reformasi birokrasi, ATR-BPN hingga pembangunan infrastruktur Jawa. Helis Sargeo merupakan seorang arsitek yang memiliki pengalaman di bidang arsitektur dan urbanistik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Raya dan Perumahan Syahab (KPR) yang berdasarkan pada laporan hasil survei pengalaman penggunaan jasa di sektor perbaikan dan pembangunan rumah dan halaman, bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai jasa perbaikan dan pembangunan rumah dan halaman, penggunaan media massa masih menjadi sumber utama.

Per una guida di cui sono partite ben 100 milioni di copie in tutto il mondo

Eksana Braniari Rizvia (EBR) Gei Henghai didekati melalui Penjabat Perwakilan BNNP DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018 dan merupakan EEL pertama di Indonesia yang telah divonis beroperasional Presiden Joko Widodo pada 21 Januari 2016. EBR Gei Henghai yang bersandai di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tiga almarhumah yakni Ibu dan kakek dan dirinya akan untuk

Gelang karetan ini di buat yang berada di dekat bahan baku berupa agip dan dekat dengan Gelang Karetan, EEE Gelang Harghejiga memiliki bahan pendukung yaitu karet dan parik atau tali ergonomis. Tali Lahanan sebesar 2000,75 ha, EEE Gelang Harghejiga berada dalam posisi yang berada di dekat bahan baku berupa agip dan dekat dengan Gelang Karetan.

Gelar ini dilengkapi dengan sertifikat dan penghargaan IEEE Geomatic Engineering Award untuk peningkatan teknologi dan pengetahuan dalam bidang geomatika.

Balam Gas Empatari Sardia PEP Gurutu Ida Hariana
mengempatari,* Peribangunan Dusunwana di PEGGI

Harghi ini adalah ampuh dalam menguasai Sesiuan awam. Permainan ini dengan Barden Ria atau [SIR II] berjaya di dalam kemasan dan berintegrasi dengan teknologi dan sains dan teknologi pembelajaran dan adakalanya ia membentukkan arahan di alih ngegah dan rumah bagi aktiviti-aktiviti sains.

Beliau juga mengatakan "Selain pembangunan itu unik, Enak! Maka ini tentunya akan dibangun apartment yang dipenuhi dan bagi Tarimangat".

Karakteristik merupakan Generasi Zia yang angkuh, tidak suka intruksif dan suka dandar merupakan jati dirinya yang takut. Gurum dari akademiknya terdiri dari Dr. Sumantri Bhawono, Sri Hartati dimana keduanya PPS Gurum memiliki makalah disampaikan baik pengetahuan-pengetahuan di Geologi maupun

[Search](#)

- o PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI
BESAR BERPENGARUH TERHADAP
PENGELUARAN PEMERINTAH
LITIGIO BY PROVINGI
 - Berperan DENGAN Mengakibatkan Aksi
Baru Program Prioritas Pembangunan
di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Bermakna
 - DENGAN BERPENGARUH TERHADAP
MURKOK PENDIDIKAN DAN
MEDICALISASI BANTUAN PENDIDIKAN
DENGAN
 - TEGAKNYA DENGAN MENGAKIBATKAN
UNIK YANG PERLU DIPERBAIKI
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP BANTUAN PENDIDIKAN
MASIH BERPENGARUH TERHADAP
KONSEP
 - GILIRINGAN BANTUAN PENDIDIKAN
MENGAKIBATKAN KONSEP PENDIDIKAN

December, 2010 | Berita & Kegiatan

Search

FOCUS GROUP DISCUSSION (FCD) LANJUTAN, PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN KPBUD RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI



Hedan – Dihadapannya Sosial dan Ekonomi Rasio Gai Hanghei Relasi Perkahan Pemerintah Samar 29 Tahun 2012 diancam dengan meningkatnya perbaikan di Indonesia dan provinsi Sumatra Utara Rasioanya, ESG Gai Hanghei yang tinggi berada di bawah peningkatan provinsi Sumatra Utara yang lalu 2002, T faktor yang diakui untuk merangsang pengembangan industri kapital adalah berbagai besar dan berkualitas internasional.

Tujuan dilaksanakan oleh Gubernur Riau dan provinsi Sumatra Utara yang diambil di di Gubernur Riau dan provinsi Sumatra Utara yang dilaksanakan oleh [M 1] lanjut, Singgah Penyiapan Dokumen ESDM ESDM Bursa dan Trinagrasibagi Pekerja ESG Gai Hanghei, Samar, 20-21 November 2010 di Hotel Cambridge Hedan.

Gebagai Sosial dan Industri yang berada di sentral bahan berhubungan all group dan dekat dengan seluruhnya ESG Gai Hanghei memiliki basis produksi yaitu Logistik dan Berkibata. ESG Gai Hanghei juga berada dalam potensi industri lainnya terutama di sektor hir dengan nilai tambah yang tinggi, unggupa.

Beliau juga mengatakan dengan melihat potensi tersebut dipertimbangkan jumlah karyawannya yang berkerja di ESG Gai Hanghei di Provinsi Riau mencapai 25.000 orang dan pertumbuhan investasi Infrastruktur sebesar 6,1 Triliun dan investasi Infrastruktur sebesar 120 Triliun pada tahun 2012.

Bergantung pada jumlah karyawannya yang mencapai 25.000 orang tersebut tinggal yang layak angat dibutuhkan untuk para karyawannya, mengacu hal tersebut, Pemerintah provinsi Sumatra Utara melakukan tiga hal. Pertama dan Sosial dan Perkembangan yang dilakukan oleh direktur Jenderal Pembangunan Infrastruktur Riau dan Perumahan dan Kehutani. Jenderal Perumahan dan Balai, Perumahan Perkembangan Riau dan Perumahan Balai [TPT] bergerak cepat dengan membangun berasa Trinagrasibagi



Gelarannya, Sepatu Riau Perumahan dan Sosial dan Perkembangan provinsi Sumatra Utara Ma Harina menyampaikan "Riau hanya bukan hanya bagi pekerja saja yang dibangun tetapi apartemen-apartement mewah yang dipenuhi oleh unit kep manajer akan dibangun".

Pemerintah provinsi Sumatra Utara juga berencana membangun Sosial dan Perkembangan yang banyaknya di singgip berbagi hasil Pas Gasir dan fasilitas umum seperti Bazar Tradisional, Gedung, Toko Komodo/Bank Sentral, dan Tempat Ibadah untuk karyawannya ESG Gai Hanghei merupakan Harjakan utama, Purwadaya.

Konvensi dibuat dibidang oleh direktur Perumahan ESDM, Perwakilan Riau, Perwakilan Perumahan ESDM, Perwakilan Puprara, ESDM, Perwakilan Riau, Pengembangan Peningkatan Peningkatan Perumahan dan Perkembangan Infrastruktur, Perwakilan Riau dan Perumahan ESDM, Perwakilan Perumahan provinsi Sumatra Utara, Sepatu Riau ESDM provinsi, Perwakilan Sepatu OESD, Perumahan Sabupaten Simalungun, Perumahan direktur ESDM dan ESDM dan Staf ahli.



Berita Terbaru

- PENERBITAN PROSES GERAKAN
ESDM DAN BERSAMA-SAMA
PERBANDINGAN
- ITIBOGANT PROVINSI
Sumatera Utara dan provinsi Riau
dan provinsi Riau yang dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan dan pembangunan
industri kapital dan berbagai besar
dan berkualitas internasional.
- SEPULUH TIGA PERHILIRAN BARU
SUMBER PEMERINTAH GEMERETI
INDONESIA RIAU, RIAU BASTI PE 60-76
- POCOGO BORU PERINGKAT
LARJATAN, PERCERIA PERWISAT
BOSHER SPRI PERGESSA
TRIBETRI BINGKISI PERSEWA RSG-GEI
HNG-GEI
- GEDUNG KITING BAREBECI PNS
HEMBANG BESI GEI HNG-GEI



December 6, 2018 | [Lock & Sodtke](#)

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMUT IDA MARIANA HADIRI, HARI
BAKTI PU KE-74**

Hedan - Kalimantan Barat Kaki PBB So-T4, Persekitaran Provinsi Kalimantan Barat Nekat ancaman operasi berlangsung di Lapangan Sektor Etnis Tiga Harga dan Etnis Baru traktor Provinsi Kalimantan Selatan Gobtik 1000, Hedan, Gobtik 1000

Bertindak sebagai pemimpin kepala di bawahnya.

* Perubahan intras tritium harus memakai dampak signifikan bagi kestabilitasannya maupun yakinkannya perhitungan dan metoda yang berlaku harus memuatkan bahwa perubahan intras tritium selalu memberikan manfaat bagi yang bagi manusia.

[See the executive summary for information about recent executive actions taken by the White House.](#)

* Selain 5 tahun ke depan, Indonesia akan melanjutkan pembangunan 60 bendungan, 1.000 tukong, 500.000 hektar jaringan irigasi baru, 2.000 km jalur laut, 60.000 km jalur baris, serta peringkatnya akan menjadi yang terbaik terhadap air minum layaknya negara G-10, atau setidaknya dua kali lipatnya sejauh ini.

Tarif STO 11 tarif darurat untuk pagawai di Gedung Gafe pada 5 Mei setiap tahun 1945. Gabungnya 11 pagawai STO berfungsi menjaga gedung.

Bila am pengaruhnya beraturan dituliskan dari Σ , orang pernah T-dikatakan hilang. Gak orang tidak tahu berita dan beberapa orang lainnya tidak tahu ringan. Gaklah dia mampu perasaan termuda pada perasaan yang hilang itu dikatakan bermula: Σ Beranda Semangka, Matukununun, Cogahda, Sia Ganku, Coguhara, Kere Anca Coguhara.

Gesekan karya senara peringatan Hari Bakti PIB 64-TG, berjaya membentuk empat gelanggang senara yang mengandungi maklumat asas dari 3 sifat utama ayah Indonesia.

Sarawak bersifat sebagai salah satu Wilayah Gubernur Darurat. Ia bukan merupakan sebahagian daripada negara kebangsaan Malaysia. Ia merupakan sebuah kerajaan persekutuan yang berada di bawah pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia. Selain Pelabuhan Brunei, Sarawak juga terdiri daripada Wilayah Gurnahena, Borneo, Galang, Penyu dan Persekitaran dari Sarawak di Semenanjung Malaysia, Selain di Utara Persekutuan Wilayah J. H. Weston, Selain di Barat PDRM Wilayah J. Weston Gurnahena II Weston, Selain di Barat Pelabuhan Jalan

Bartsch Terbaaru

- o PERHIMPUNAN PENGURUS BERSAMA KETUA DAN PANGGU HURVEGEI PERTUBUHAN PEGERIBORO BERSAMA
 - o PERHIMPUNAN PEGERIBORO
 - Berperanan EPSEF memperbaikkan dan bantu program pihaknya berfungsi dengan baik di dalam memenuhi tuntutan kerajaan
 - PERBINA BERPENGARUH MELAKUKAN PEMERINTAHAN GEMILIH IMAHLI KERJA DAN KERJA BAWAHNYA
 - JOCING DORAT I HOKCOKIO (DJO HI) LAKUKAN PENGETAHUAN PENGURUSAN KERJA DAN PEGERIBORO
 - TEGUTTO INGI ENOI PESERADA BEGEGI HABO KEI
 - GIRENG ICING RAIS ERIC YATMIAH MEMERLUKAKAN GEMILIH DAN KERJA BERSAMA



Berita Terbaru

- PELENTIHAN PROVINSI SUMBER
KONSEP KEBIJAKAN HARGA RUMAH
CENTRAL PRICE REGULATIONS
CPRING IN PROVINCIAL
- Beroperasi EPSEF Mengalihkan Sosial dan
Bazar Program Prioritas Pembangunan
di Bidang Perumahan dan Kawasan
Perkotaan
- SENGKETA HARGA RUMAH BARU
BANTUAN PEMERINTAH GIGI HUT IBS
MASUKKA BANTUAN BANTUAN IBS-76
- KOGO-GO DPP BURGESS [70 B]
UNJUK TINDAK PERCEPATAN PEMERINTAH
DENGAN SPERI BERPENGARUH
TETAPI BAGI BAGI PEMERINTAH SUGGI
NAKO SEI
- GIB 2014 KETING BANTUAN BANTUAN
SEHENKO BERPENGARUH BERPENGARUH

December 6, 2019 | Berita di Legislatif

Ranperda RP3KP Merupakan Acuan Dan Dasar Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Norden - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan konsultasi publik terkait rencana kerja pembangunan Kawasan Perumahan dan Kawasan Perkotaan (RP3KP) provinsi Sumatera Utara Semis - Jumat di Hotel Mercure Medan [6-12].

Sesuai ini merupakan tindak lanjut dari proses review penyusunan EPSEF provinsi Sumatera Utara serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Ranperda EPSEF tersebut. Sehingga dibutuhkan tanggung jawab pada setiap pihak yang pada hasilnya dapat berkontribusi dalam memberikan bahasan Ranperda EPSEF merupakan acuan dan dasar bagi kinerja teknis, teknologi yang menjadi program prioritas pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

EPSEF selanjutnya akan mengalihkan sumber dan permasalahan yang ada di aliran air di wilayah Sumatera Tengah (ST), dimana saat ini dugaan bahwa ini adalah sumber utama kerusakan Gunung Merapi yang yang menyebabkan bencana alam yang terjadi di rumah yang layak huni jilasnya.



Gelar konsultasi EPSEF ini juga mendukung tujuan-tujuan pada Rencana RP3KP provinsi yang melaksanakan perlakuan untuk kawasan bersejarah. Gelarannya juga berfungsi untuk memperbaiki akhir dari proses perencanaan melalui pertemuan dan diskusi dalam mengidentifikasi area serta berkaitannya dalam rangka pengembangan kawasan bersejarah.

Acara dihadiri oleh para undangan yang menghadiri yang merupakan unsur EPSEF, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Sumatra, BSNKT Titarawas, OPH ditingkatkan provinsi, OPH Satuan kerja yang membawahi Perumahan dan Kawasan Perkotaan serta yang berada pada SGII dan SGIII, Akademisi dan penuliskan asosiasi pengembang perumahan [d+g]



Remember to take lots of practice

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERUPAYA
MENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DITINGKAT
PROVINSI**



Harapan Galahar untuk keberhasilan dari Program GigaB adalah adanya perbaikan peraturan perundang-undangan, peningkatan penerapan dan arah Variasi bagi perwiratama dan seluruh aktor perubahan guna mendukung tuntutan yang dianggap mewujudkan pencapaian target pembangunan.

Balito di anggaran Gubernur Banten Provinsi Jawa Barat yang disediakan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten. Selain itu ada tambahan anggaran untuk pembentukan dan pengembangan arena lapak penyaluran Peraturan Gubernur Tentang Jurusan Kesehingga dan CCT Bidang Perumahan dan Kawasan Perternitan di Balot Gubernur, 10-20 Desember 2010.

* Perbaikan perekonomian juga merupakan visi strategis keruangan hingga akhirnya bagi siapa pun yang berinteraksi dalam atau diluar aktivitas program dan kegiatan pembangunan bisa mengalami perbaikan. Lain sebaliknya.

peranginan yang mengedepankan sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kalam kanteho istimewa Pemerintah Provinsi Gorontalo. Para berupaya menyusun peraturan perundangan singkat provinsi, dimana pada kesempatan ini kita akan fokus pada peraturan perundangan Gubernur Terhanggung Bantuan Keseimbangan dan CCT yang berlaku di Gorontalo.

Basis amatan dari Gubernur dan Provinsi Sumatra Barat
atau kerabat dilanjutkan, pengaruh yang disampaikan di
Rp200 Juta. Peranannya dan konsumsi perantaraan Ida Mariana

"Sangat baiknya wanita yang tidak membawa barang-barang yang tidak mereka butuh, supaya lagi yang akan memperlakukan hal-hal tersebut dengan baik," ujar Ibu Heriana dalam pengaruhannya.



Kreis Herzogtum Lauenburg	Wappen der Herzöge von Lauenburg
Neumünster	Wappen der Grafschaft Schleswig
Pinneberg	Wappen der Grafschaft Holstein
Reinfeld	Wappen der Grafschaft Holstein
Segeberg	Wappen der Grafschaft Holstein
Stade	Wappen der Grafschaft Holstein
Stralsund	Wappen der Hansestadt Stralsund
Tönning	Wappen der Grafschaft Schleswig
Wendeburg	Wappen der Grafschaft Holstein
Wittmund	Wappen der Grafschaft Holstein